

**PERAN PEMERINTAH KAMPUNG SIALANG BARU DALAM  
MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN  
ZERO STUNTING KABUPATEN SIAK**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial  
(S.Sos) pada Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah  
Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru*



**Disusun Oleh:**

**JUNAIDI RAIS**

**NIRM: 1216.20.2420**

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM  
FAKULTAS DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM DINIYAH PEKANBARU  
TAHUN 2024 M/1445 H**

## ABSTRAK

**Nama : JUNAIDI RAIS**

**Judul : PERAN PEMERINTAH KAMPUNG SIALANG BARU DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN ZERO STUNTING KABUPATEN SIAK**

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Stunting mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak. Sedangkan Zero Stunting adalah upaya pemerintah untuk mewujudkan nol gagal pertumbuhan pada anak. Faktor penyebab timbulnya stunting bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti kekurangan gizi, sanitasi yang buruk, pola asuh yang tidak tepat, kemiskinan, terbatasnya layanan kesehatan dll. Tempat penelitian ini dilakukan di Kampung Sialang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak. Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Januari 2024 sampai bulan Maret 2024. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisis Data dalam penelitian ini yaitu Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Faktor pendukung dalam mewujudkan Zero Stunting ini adalah adanya kemauan, kemampuan dan kesempatan bagi Masyarakat untuk memahami akan bahaya stunting ini, sedangkan factor penghambatnya yaitu, ekonomi yang terbatas atau tidak memadai sehingga asupan dan gizi ibu saat hamil tidak terpenuhi, Pendidikan orangtua yang rendah serta pekerjaan orangtua yang penghasilannya dibawah rata-rata. Hasil dari Peran Pemerintah Kampung Sialang Baru Untuk Mewujudkan Zero Stunting kabupaten Siak yakni begitu baik atau secara berangsur-angsur sudah menurun, karena pemerintah Kampung Sialang Baru telah dapat membantu mereka dalam memecahkan masalah yang telah mereka hadapi yaitu Stunting. Di mulai dari produktifnya pemeriksaan ibu hamil dengan mengkonsumsi pil tambah darah, perubahan makanan bergizi untuk ibu hamil dan anak-anak balita, sanitasi yang sudah baik, lingkungan yang baiki, dan air yang layak konsumsi.

Kata Kunci: *Peran Pemerintah, Zero Stunting*

## ABSTRACT

## **JUNAI DI RAIS (2024): The Role of Sialang Baru Government in Empowering The Community To Realize Zero Stunting In Siak District**

Stunting is the failure of toddler to grow normally due to chronic malnutrition, especially in the first 1000 days of life (HPH). Stunting affects brain growth and development. Meanwhile, zero stunting is the government's effort to realize zero growth failure in children. Factors that cause stunting can be caused by several factors such as malnutrition, poor sanitation, appropriate parenting patterns, poverty, limited health services and others. The location of this research was carried out in Siang Baru village, Lubuk Dalam sub-district in Siak district. The research period was carried out from January 2024 to March 2024. Data collection techniques in this research were interviews and documentation. The data analysis techniques in this research are data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The supporting factors in realizing zero stunting are the willingness, ability and opportunity for the community to understand the dangers of stunting, while the inhibiting factors are limited or inadequate economic conditions so that maternal nutritional intake during pregnancy is not met, low parental education and parents whose income is below average. The results of research on the role of Sialang Baru government to realize zero stunting in Siak Regency are considered good and the stunting rate has gradually decreased, because Sialang Baru government has helped them in solving the stunting problem that they experienced. Beginning from actively checking pregnant women plus diligently ensuring blood-boosting intake, changing the nutritious food menu for pregnant women and toddlers, good sanitation, good environment, availability of water suitable for consumption.

**Keywords:** Role of Government, Zero Stunting



INSTITUT AGAMA ISLAM DINIYAH PEKANBARU  
FAKULTAS DAKWAH

FACULTY OF DAKWAH

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 100 / Jl. Kuau No. 1 HP. 0811-7069-222 | Website :  
[www.diniyyah.ac.id](http://www.diniyyah.ac.id) | email : [admin@diniyyah.ac.id](mailto:admin@diniyyah.ac.id)

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor: 016 /B-01/PTA/FD-IAIDP/8/2024

Tugas Akhir dengan judul : **PERAN PEMERINTAH KAMPUNG SIALANG BARU  
DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN ZERO  
STUNTING KABUPATEN SIAK**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : JUNAIDI RAIS  
Nomor Induk Registrasi Mahasiswa : 1216.20.2420  
Telah diujikan pada : Selasa, 6 Agustus 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : B

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru

TIM UJIAN TUGAS AKHIR  
Ketua Sidang

IRWAN WAN TUTRISNO.MTUT ISNO,ME  
NIDN.2010108802

penguji I

Peng • i l

NIDN.

1302



Pekanbaru, 6 Agustus 2024  
Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru  
Dekan Fakultas Dakwah

  
Dr. Hervrizal, MA

MUHARRANI. M.Pd  
2109108302

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yang Terhormat:  
Dekan Fakultas Dakwah  
Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama               JUNAIDI RAIS  
NIRM               . 1216.20.2420

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Sialang Baru dalam Memberdayakan Masyarakat untuk Mewujudkan Zero Stunting Kabupaten Siak

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang sosial.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum, Wr.Wb

Pekanbaru, Mei 2024

Mengetahui,

pembimbing I Pembimbing II

  
ah Sina a

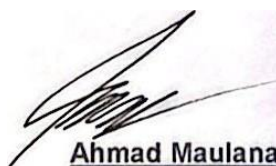
YeniYa



ah Sina a

NID : 2105079001  
NIDN:2109038701

Ketua Prodi Pengembanagn Masyarakat Islam



Ahmad Maulana Ahmad Maulana Anshori M.Sos

NIDN:2105039701

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Kepada Yang Terhormat:

**Dekan Fakultas Dakwah  
Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru**  
Di-  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : JUNAIDI RAIS

NIRM : 1216.20.2420

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Sialang Baru Dalam Memberdayakan Masyarakat Untuk Mewujudkan Zero Stunting Kabupaten Siak

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang sosial.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb

Pekanbaru, Mei 2024

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

**Yeni Yasyah Sinaga, MA**  
NIDN: 2105079001

**Syamsul Rizal, M.Pd.I**  
NIDN:2109038701

Ketua Prodi Pengembanagn Masyarakat Islam

**Ahmad Maulana Anshori, M.Sos**  
NIDN:2105039701  
**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JUNAIDI RAIS

NIRM : 1216.20.2420  
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam  
Fakultas : Dakwah  
Institusi : Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: **PERAN PEMERINTAH SIALANG BARU UNTUK MEWUJUDKAN ZERO STUNTING KABUPATEN SIAK** adalah hasil karya pribadi dan tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Pekanbaru, Agustus 2024

Yang Menyatakan,

Materai Rp 10.000

**JUNAIDI RAIS**  
NIM. 1216.20.2420

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah ﷻ yang telah melimpahkan *taufiq* dan *hidayah*-Nya berkat rahmat dan petunjuknya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan dengan baik. Sholawat serta salam

semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad ﷺ yang telah membawa petunjuk kebenaran seluruh umat manusia yaitu Agama Islam yang kita harapkan syafaatnya di dunia dan di akhirat. Suatu kebahagiaan yang sulit terlukiskan mana kala penulis telah sampai pada final studi dijenjang perguruan tinggi ini berupa terbentuknya skripsi ini dengan judul “**Peran Pemerintah Sialang Baru Dalam Memberdayakan Masyarakat Untuk Mewujudkan Zero Stunting Kabupaten Siak**”

Karya tulis ini merupakan skripsi yang diajukan Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial. Selama penyusunan skripsi ini dan selama belajar di Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru, penulis banyak mendapatkan bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini akan menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada Bapak dan ibu yang telah berjuang mendidik, merawat dan menasehati saya sejak dalam perkuliahan hingga sampai sukses. Sehingga saya termotivasi untuk cepat menyelesaikan skripsi ini. Dalam menyelesaikan Skripsi ini juga menyadari begitu banyak hal yang perlu diperbaiki dan perlu bantuan dari berbagai pihak, terutama dari pihak kampus, dosen pembimbing, sehingga menjadikan Skripsi penelitian ini baik dan berkualitas. Semoga Skripsi ini menjdikan langkah awal untuk menuju penelitian yang ilmiah dan akuntabel. Amiin yaa Rabbal Aalamiin. Oleh karena itu, menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi- tingginya kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Novi Yanti, MM selaku Rektor Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru.
2. Bapak Dr. Mursal, M.Pd.I selaku Wakil Rektor I Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru. Yth Ibu Refika, M.Pd.I selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Irwan

Tutrisno, ME selaku Wakil Rektor III. Yang telah ikut memberikan dorongan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik.

3. Kepada ayahanda (Alm.Ramli) dan ibunda tercinta (Darmi) yang tiada pernah lelah membimbing, serta istri tercinta ( Wan Nety Ramdani) dan anak-anakku tersayang (Habib dan Haykal) yang memberi motivasi kepada penulis.
4. Bapak Dr. Hervrizal, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah Intitut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru yang banyak membimbing memberikan motivasi ini.
5. Kepada Bapak Ahmad Maulana Anshori ketua jurusan Pengembangan masyarakat Islam (PMI) Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru yang telah menerima pengajuan judul Skripsi penulis.
6. Ibu Yeni Yasyah Sinaga, MA. selaku dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan kritik dan saran terhadap Skripsi penulis.
7. Bapak Syamsul Rizal, M.Pd.I selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan kritik dan saran terhadap Skripsi penulis.
8. Bapak/Ibu seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama proses perkuliahan di Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru.
9. Seluruh Staf dan Karyawan Intitut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru yang tak bisa di sebutkan satu persatu.
10. Yang tersayang sahabat-sahabat seperjuangan di Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru.

Harapannya semoga karya tulis ini bermanfaat bagi bagi para pembaca pada umumnya. Semoga usaha dan jasa baik dari Bapak, Ibu, dan saudara/i sekalian menjadi amal ibadah dan diridhoi Allah ﷻ, dan mudah- mudahan Allah ﷻ akan membalasnya, *Aamiin Yaa Robbal 'Aalamiin...*

Pekanbaru, Agustus 2024

Peneliti

**JUNAI DI RAIS**

**NIRM: 1216.20.2420**

## DAFTAR ISI

<b>Abstrak .....</b>	<b>i</b>
<b>Pengesahan Penguji.....</b>	<b>ii</b>
<b>Persetujuan Pembimbing.....</b>	<b>iii</b>
<b>Pernyataan Keaslian Skripsi.....</b>	<b>iv</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Hasil Penelitian.....	7
E. Penegasan Istilah.....	7

F. Kerangka Berpikir.....	9
G. Hasil Penelitian Terdahulu.....	11
H. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Peran Pemerintah .....	15
B. Zero Stunting .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>48</b>
A. Pendekatan Metode Penelitian.....	48
B. Jenis Dan Sumber Data .....	49
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	50
D. Subjek dan Objek.....	50
E. Teknik Pengumpulan Data .....	50
F. Teknik dan Analisan Data .....	51
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>54</b>
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	54
B. Hasil Penelitian .....	54
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Stunting adalah sebuah kondisi dimana tinggi badan seseorang jauh lebih pendek dibandingkan tinggi badan orang seusianya. Penyebab utamanya stunting adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan, hingga masa awal anak lahir yang biasanya tampak setelah anak berusia 2 tahun. Stunting itu sendiri merupakan kondisi gagal tumbuh pada bayi (0-11 bulan) dan anak balita (12-59 bulan) akibat kekurangan gizi kronis terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan sehingga anak terlalu pendek untuk usianya (Anwar et al., 2022a).

Stunting pada anak akan terlihat sampai anak berusia 2 tahun, nutrisi dimulai saat bayi masih dalam kandungan dan dalam beberapa hari pertama setelah lahir. Stunting (*kerdil*) adalah kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur anak-anak pada umumnya. Kondisi ini diukur dari minus dua standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO. Penjelasan *stunting* di Sialang Baru sering disosialisasikan pemerintah setempat untuk menghadapi permasalahan gizi yang berdampak serius terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu masalah gizi yang menjadi perhatian utama pemerintah saat ini untuk mencegah terjadinya stunting di Sialang Baru (Aurima et al., 2021).

Kekurangan gizi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir, tetapi kondisi stunting baru nampak setelah anak berusia 2 tahun, bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir, tetapi kondisi stunting baru nampak setelah anak berusia 2 tahun. Permasalahan gizi ini bisa diatasi ketika mereka memahami masalah dan mengetahui cara mengatasinya sesuai dengan kondisi masing-masing. Jadi disini dibutuhkan juga kewenangan dari masyarakat dan implikasinya kewenangan itu yaitu masyarakat berwenang untuk mengatur dan mengurus kegiatan berdasarkan hak asal usul dan kegiatan itu, masyarakat juga berwenang untuk mengurus kegiatan yang ditugaskan oleh pemerintah dan pemerintah daerah (Aurima et al., 2021). Oleh sebab itu, di samping implementasi peraturan perundangan yang konsisten diperlukan pula reorientasi pejabat publik agar benar-benar menjalankan tugasnya sebagai pelayan *public* dalam mewujudkan *zero stunting*. Mekanisme *checks and balances* harus terus dikembangkan di antara lembaga-lembaga pemerintah daerah yang ada, dan yang tidak kalah penting seluruh komponen dalam masyarakat hendaknya lebih berani untuk terus menerus menyuarkan aspirasi mereka kepada birokrasi publik.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau dan berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Pemerintah berkewajiban memberikan jaminan kesehatan, baik untuk warga yang mampu maupun yang tidak mampu. Tanggung jawab pemerintah juga termasuk dalam penyesuaian sumber daya dibidang kesehatan. Pelayanan

kesehatan masyarakat sebagai seluruh upaya kesehatan yang bersifat promotif, preventif baik untuk sasaran bayi, anak, remaja, ibu hamil, ibu menyusui, bapak, maupun yang sudah lanjut usia. Lokasinya menyeluruh dan berada mulai dari tingkat rumah tangga, tempat kerja dan tempat-tempat umum maupun tatanan sekolah. Pelayanan kesehatan masyarakat lebih mengutamakan pelayanan promotif dan preventif dengan pendekatan kelompok masyarakat dan keluarga, serta sebagian besar diselenggarakan bersama masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kerja Puskesmas.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mentransformasikan pertumbuhan masyarakat sebagai kekuatan nyata masyarakat, untuk melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai dan kepentingan didalam sendi aspek kehidupan. Pemberdayaan masyarakat mempunyai arti meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat. Pada hakikatnya pemberdayaan masyarakat ini dilakukan untuk menyiapkan masyarakat berpartisipasi pada sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, seraf berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri. Berdasarkan teori di atas, maka dapat disintesis pemberdayaan adalah proses memandirikan masyarakat serta meningkatkan kemampuan yang dimiliki masyarakat dengan keterampilan dan pengetahuan serta menggunakan kekuasaan. Tujuannya agar masyarakat dapat lebih mandiri dan memiliki kompetensi diri yang dapat menunjang (Milakarma & Montessori, 2018).

Tiga upaya pokok dalam setiap pemberdayaan masyarakat yang disebut sebagai Tri Bina, yaitu bina manusia, bina usaha, bina lingkungan. Berdasarkan isi dari Tri Bina tersebut salah satu upaya pokok lagi yaitu bina kelembagaan. Bina Manusia merupakan upaya yang pertama dan utama yang harus diperhatikan dalam setiap upaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini didasarkan oleh pemahaman bahwa tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kualitas hidup atau kesejahteraan manusia. Bina usaha merupakan suatu upaya yang penting dalam setiap pemberdayaan, karena jika bina manusia tidak memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan (ekonomi) hal tersebut tidak akan berguna, bahkan menambah kekecewaan. Sebaliknya, jika hanya bina manusia yang mampu dalam waktu dekat/cepat memberikan dampak atau manfaat bagi perbaikan kesejahteraan (ekonomi) yang akan laku atau memperoleh dukungan dalam bentuk partisipasi masyarakat.

Bina lingkungan yang terkait dengan upaya pemberdayaan masyarakat yaitu kesadaran berupa kewajiban terhadap lingkungan yang ditetapkan dalam persyaratan investasi dan operasi yang terkait dengan perlindungan, pelestarian, dan pemulihan (*rehabilitasi/reklamas*) sumber daya alam dan lingkungan hidup. Bina Kelembagaan sebagai suatu perangkat umu yang ditaati oleh anggota dalam suatu komunitas (masyarakat) yang dapat berfungsi secara efektif. Jika suatu lembaga memiliki empat unsur berikut, maka dapat dikatakan suatu bentuk hubungan sosial.

Peran pemerintah sangat dibutuhkan bagi warga Desa Sialang Baru karena pemerintah bertanggung jawab besar untuk memfasilitasi masyarakatnya, oleh

karena itu diperlukan kebijakan dan wewenang dari pemerintah desa guna untuk memudahkan masyarakat dan masyarakat bisa mendapatkan kesehatan yang baik dengan fasilitas yang diberikan pemerintah desa. Dengan ini pemerintah berperan menyediakan program pelayanan kesehatan bagi anak balita agar dapat mengoptimalkan fungsi tubuh anak. Hal penting lainnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dari itu perlu kebijakan dan wewenang dari pemerintah Sialang Baru untuk meningkatkan kesehatan masyarakatnya dalam program pelayanan kesehatan masyarakat (Nugroho & Pradana, 2021).

Strategi pemerintah di bidang kesehatan anak dan balita adalah untuk meningkatkan pelayanan terhadap kesehatan anak dan balita. Salah satu program dan kegiatan kesehatan yang dapat diupayakan di Sialang Baru adalah kegiatan Pos Layanan Terpadu (Posyandu). Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah desa yang dibentuk melalui musyawarah Desa/Kelurahan yang dikelola oleh pengelolaan posyandu. Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu dicabut dan diganti dengan undang-undang tentang Kesehatan yang baru Posyandu diharapkan dapat memberikan layanan secara

terpadu kepada warga masyarakatnya, khususnya pada balita, diantaranya pemeriksaan kesehatan dan peningkatan gizi.

Dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Pemerintah Sialang Baru dalam Memberdayakan Masyarakat untuk Mewujudkan Zero Stunting Kabupaten Siak”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana Peran Pemerintah dalam Memberdayakan Masyarakat Untuk Mewujudkan Zero Stunting di Kampung Sialang Baru Kabupaten Siak?
2. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Pemerintah dalam Memberdayakan Masyarakat untuk Mewujudkan Zero Stunting Di Kampung Sialang Baru Kabupaten Siak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mewujudkan *Zero Stunting* di Kampung Sialang Baru Kabupaten Siak
2. Untuk mengetahui Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Pemerintah dalam Memberdayaan Masyarakat untuk Mewujudkan *Zero Stunting* di Kampung Sialang Baru Kabupaten Siak.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Sebagai sumbangsih pemikiran untuk mengembangkan khazanah keilmuan yang berkaitan dengan Pengembangan Masyarakat Islam.

## 2. Secara Praktis

- 1) Bagi Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru, hasil penelitian ini dijadikan sebagai dokumentasi dan sumber rujukan bagi peneliti selanjutnya, sekaligus sebagai bahan kajian bagi mahasiswa.
- 2) Sebagai bahan pertimbangan terhadap peneliti selanjutnya yang ada relevansinya dengan masalah tersebut.
- 3) Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosial di Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru.

## **E. Penegasan Istilah**

1. Peran adalah suatu tindakan atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap suatu perubahan atau harapan yang mengarah pada suatu kemajuan. Dalam kamus bahasa Indonesia di artikan, “bagian dari tugas utama yang harus dilakukan”. Peran juga meliputi norma-norma yang di hubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat (Nugroho & Pradana, 2021). Peran yang di maksud disini adalah perilaku suatu kelompok yang melaksanakan suatu kegiatan.

2. Istilah Pemerintah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan, Sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau bagianbagiannya, sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan, dan penguasa suatu Negara. Pemerintah yang di maksud disini adalah orang yang mempunyai wewenang dalam mengatur kehidupan suatu daerah.
3. Pemberdayaan adalah sebuah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif, dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani persoalan dasar yang dihadapi dan meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan harapan. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri (Noor, 2011). Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Suatu usaha hanya berhasil dinilai sebagai "pemberdayaan masyarakat" apabila kelompok komunitas atau masyarakat tersebut menjadi agen pembangunan atau dikenal juga sebagai subjek. Disini subjek merupakan motor penggerak, dan bukan penerima manfaat (bahasa Inggris: *beneficiaries*) atau objek saja. Pemberdayaan yang di maksud disini adalah penyadaran terhadap masyarakat.
4. Kampung atau Desa dipahami secara umum sebagai tempat berkumpulnya masyarakat, dan bila dilihat dalam struktur administrasi kewilayahan negara

Indonesia maka desa merupakan unit yang terkecil dalam struktur tata pemerintahan. Wilayah desa di kelola oleh pemerintahan desa yang berfungsi sebagai penyelenggara pemerintahan di wilayah desa. Kampung yang dimaksud adalah suatu daerah terkecil yang dihuni beberapa kepala keluarga.

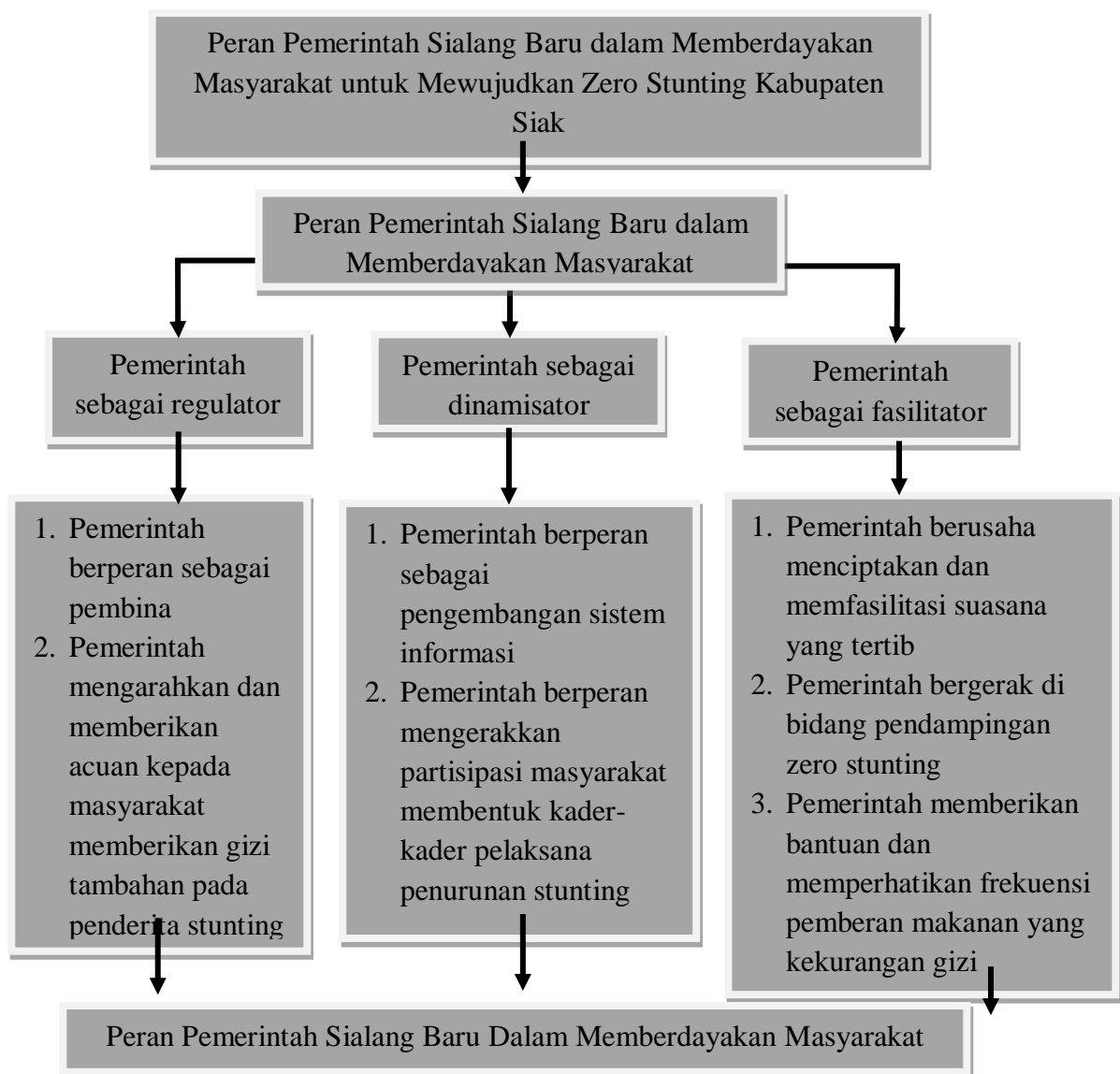
5. *Zero Stunting* adalah sebuah program yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan *Stunting* (gangguan pertumbuhan pada anak) di Indonesia. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir. Akan tetapi, kondisi *stunting* baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Balita pendek (*stunted*) dan sangat pendek (*severely stunted*) adalah balita dengan panjang badan (PB/U) atau tinggi badan (TB/U) menurut umurnya dibandingkan dengan standar baku WHOMGRS (Multicentre Growth Reference Study) 2006. Sedangkan definisi *stunting* menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) adalah anak balita dengan nilai z-scorenya kurang dari  $-2SD$ /standar deviasi (*stunted*) dan kurang dari  $-3SD$  (*severely stunted*) (Hasyim et al., 2022). *Zero stunting* yang di maksud disini adalah menghapuskan angka gangguan pertumbuhan pada anak.

#### **F. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir dibuat berupa skema sederhana yang menggambarkan secara singkat proses pemecahan masalah yang dikemukakan oleh peneliti

kemudian dijelaskan secara detail gambaran jalannya penelitian ini secara keseluruhan dapat diketahui gambarannya secara jelas dan terarah. Seperti yang telah dipaparkan diatas kajian ini berkenaan dengan Peran Pemerintah Sialang Baru dalam Memberdayakan Masyarakat untuk Mewujudkan Zero Stunting Kabupaten Siak, Adapun indikatornya sebagai berikut

### Kerangka Berpikir



## Bagan 1. Kerangka Berpikir

### **G. Penelitian Yang Relevan**

1. Jurnal Shahih, Vol.22 No.12 Tahun 2017, Gizi Buruk dalam Perspektif Islam: Respon Teologis Terhadap Persoalan Gizi Buruk oleh Egie Sukmaa Baihaki, menyimpulkan bahwa gizi buruk dapat ditekan dengan pola hidup sehat yang harus diperhatikan oleh keluarga Indonesia. Mengetahui kandungan gizi dari makanan yang dikonsumsi akan berakibat langsung pada jumlah asupan gizi yang dimiliki. Islam menekankan makanan yang dikonsumsi oleh manusia harus memenuhi dua kriteria utama yakni baik dan halal. Dengan begitu makanan yang kita konsumsi harus diteliti agar dapat membantu pertumbuhan tubuh dan kesehatan. Menjaga asupan makanan yang bergizi juga menjadi tanggung jawab untuk pasangan suami istri. Saat dalam kandungan, seorang ibu wajib menjaga kesehatan dan tumbuh kembang bayi dengan mengonsumsi makanan yang bergizi. Anak ialah amanat yang perlu dijaga dengan baik dan kita rawat dengan memenuhi segala kebutuhan hidupnya termasuk mengenai asupan gizi. Selain itu, persoalan gizi buruk dapat dilihat angkanya dengan memperhatikan beberapa aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat ialah ketersediaan pangan yang berkualitas, pemerataan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan tiga aspek tersebut diharapkan dapat mengurangi terjadinya gizi buruk. Perbedaannya yaitu peneliti Egie Sukma meneliti tentang Gizi Buruk dalam Perspektif Islam, sedangkan penelitian ini tentang Peran pemerintah dalam mewujudkan Zero stunting.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Febi Rama Silpia dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Stunting (Gangguan Pertumbuhan Pada Anak) Didesa Pancasila Kecamatan Natar Lampung Selatan. (1541020113), (S1) Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Radin Intan Lampung Tahun 2019. Tujuan dari tesis ini adalah mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan stunting di desa pancasila kecamatan natar lampung selatan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan populasi keseluruhan yang diteliti 10 berjumlah 12 orang dengan menggunakan teknik snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan mengadakan pelatihan penanggulangan stunting yang melalui tahap penyadaran, dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan meningkatkan kapasitas diri, tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran didalam pembangunan, dan tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuk inisiatif dan kemampuan inivatif untuk mengantarkan pola kemandirian. Sudah dianggap berhasil, karena sudah berkurangnya penderita stunting dari 26 anak menjadi 12 anak yang sudah ikut mulai membaik dari berat badan. Hal tersebut merupakan tujuan dari pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan dalam penanggulangan stunting.

Perbedaannya yaitu Febi Rama Silpia meneliti dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Stunting (Gangguan Pertumbuhan Pada Anak) Didesa Pancasila Kecamatan Natar Lampung Selatan, sedangkan penelitian ini tentang Peran pemerintah dalam mewujudkan zero stunting.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Astuti (2018) yang berjudul Gerakan Pencegahan Stunting Melalui Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Pada penelitian ini dilakukan promosi pencegahan stunting bagi masyarakat serta seluruh stakeholder yang ada bertanggung jawab dalam penurunan stunting. Selain itu, diharapkan dengan meningkatkan pengetahuan kaderkader posyandu terkait stunting, masyarakat mampu untuk mengurangi angka prevalensi terjadinya stunting. Perbedaannya adalah Sri Astuti (2018) meneliti dengan berjudul Gerakan Pencegahan Stunting Melalui Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, sedangkan penelitian ini tentang Peran pemerintah dalam mewujudkan zero stunting di kabupaten Siak.

## **H. Sistematika Penulisan**

**BAB I** : Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, kerangka berpikir, kajian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

**BAB II** : Kajian teoritis yaitu, peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat, zero stunting, peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat

- BAB III : Metodologi Penelitian yang meliputi pendekatan dan metode penelitian, sumber data, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.
- BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan peran pemerintah siyang baru dalam memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan zero stunting di kabupaten siak dengan faktor pendukung dan penghambatnya.
- Bab V : Penutup, menguraikan tentang kesimpulan dan saran

## **BAB II**

### **KERANGKATEORITIS**

#### **A. Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat**

##### **1. Pengertian Peran Pemerintah**

Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Jika ditujukan dalam hal kolektif di masyarakat, seperti himpunan, gerombolan, atau organisasi, maka peranan berarti “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berkedudukan didalam sebuah masyarakat”. (Hendra, 2017) Peran adalah suatu perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan dan sebagai tolak ukur seseorang sebagai orang pemimpin apakah orang itu dapat meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas-tugasnya yang diberikan kepada seseorang akan membuat orang tersebut dapat memaksimalkan kinerja dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Menurut Cohen peran merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menduduki status tertentu atau seseorang yang mempunyai wewenang. (Rulyansah & Hayukasari, 2018) Menurut Bruce J Cohen peran merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang yang menduduki status tertentu atau seseorang yang mempunyai wewenang.

Pemerintah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan, Sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau bagianbagiannya, sekelompok orang yang secara

bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan, dan penguasa suatu Negara. (Milakarma & Montessori, 2018) Dapat diartikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari beberapa badan yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan dan mengatur kelangsungan hidup suatu negara, atau sekumpulan orang yang diberi kekuasaan yang terbatas untuk memikul tanggung jawab yang dilakukan bersama-sama.

Secara definitif, pemerintah itu mempunyai arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas pemerintah itu meliputi seluruh organ kekuasaan di dalam negara yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Bahkan dalam arti luas ini Pemerintah diartikan sebagai pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga yang disertai wewenang untuk mencapai tujuan negara. Dalam arti yang luas pemerintah itu sering disebut Regering. Tetapi dalam arti yang sempit pemerintah (yang disebut Bestuur) hanya menyangkut organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan (eksekutif) yang bisa dilakukan oleh kabinet dan aparat-aparatnya dari tingkat pusat ke daerah.

Pemerintah tidak lain adalah organisasi yang mengatur dan menyelenggarakan urusan negara. Tanpa pemerintah, sulit dibayangkan suatu negara dapat berjalan dengan baik. Fungsi pemerintah antara lain: menegakkan hukum, mengadakan Peraturan Daerah dan menyelaraskan kepentingan-kepentingan masyarakat yang bertentangan agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan efektif, pemerintah dapat menggunakan atribut hukum dari negara, yakni kedaulatan. Karenanya, pemerintah terkadang memegang monopoli untuk

menjalankan paksaan fisik secara legal sehingga dalam keadaan seperti ini timbul anggapan bahwa pemerintah identik dengan negara.

Pemerintahan ini sebagai alat untuk bertindak demi kepentingan rakyat untuk mencapai tujuan organisasi negara, antara lain kesejahteraan, pertahanan, keamanan, tata tertib, keadilan, kesehatan dan lain-lain. Untuk dapat bertindak dengan sebaik-baiknya guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah mempunyai wewenang, wewenang mana dibagikan lagi kepada alat-alat kekuasaan negara, agar tiap sektor tujuan negara dapat dikerjakan secara bersamaan.

Berkenaan dengan pembagaaian wewenang ini, maka terdapatlah suatu pembagian tugas negara kepada alat-alat kekuasaan negara. dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiaptiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang.

#### **a. Kewenangan Pemerintahan**

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan keanekaragaman daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan salah satu prioritas utama yang harus

dilaksanakan pemerintah Indonesia dalam rangka merealisasikan agenda reformasi, agenda otonomi daerah dalam arti yang seluas-luasnya merupakan keputusan politik untuk mengakomodir tuntutan daerah dan dinamika masyarakat yang semakin kritis dan responsif untuk memaknai pembangunan.

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah kabupaten merupakan sisa kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan propinsi (*residual power*). Dengan demikian pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang sangat besar. Oleh karena itu, bobot kewenangan terletak dipemerintahan daerah atau kabupaten/kota, kecuali kewenangan yang telah ditentukan oleh pemerintahan propinsi atau pusat. Jadi pemerintahan daerah dapat berinisiatif membuat kewenangan sendiri berdasarkan kebutuhan daerahnya. Oleh karena itu pemerintahan daerah harus melaksanakan kewenangan yaitu: Pekerjaan umum, Kesehatan, Pendidikan dan kebudayaan, Pertanian, Perhubungan, Industri dan Peraturan Daerah, Penanaman modal dan Lingkungan hidup.

#### **b. Fungsi Pemerintahan**

Fungsi pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Bahwa pemerintahan daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas etonomi dan tugas pembantuan
- b. Menjalan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

- c. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

## **2. Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan adalah sebuah proses dimana orang akan menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. (Edi Suharto, 2006) Pemberdayaan merupakan proses menyeluruh, suatu proses aktif antar motivator, fasilitator dan kelompok masyarakat yang ingin diberdayakan melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, pemberian berbagai kemudahan serta kesempatan untuk mencapai akses sistem sumber daya dalam mengembangkan kesejahteraan masyarakat.

Prinsip dan dasar pemberdayaan prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat:

- a. Pendekatan dari bawah (*bottom up approach*), pada kondisi ini pengelolaan dan para stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai, kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
- b. Partisipasi (*participation*), dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan

- c. Konsep berkelanjutan, merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi
- d. Keterpaduan, yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional, dan nasional
- e. Keuntungan sosial dan ekonomi, merupakan bagian dari program pengelolaan

Pemberdayaan masyarakat mempunyai kesamaan dengan dakwah dalam bentuk aksi. Kemajuan akan diperoleh seseorang jika mampu mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Hal ini sama seperti perintah Nabi yang memerintahkan semua orang untuk bekerja keras, beribadah taat, bersikap baik terhadap semua orang, menjaga keharmonisan dalam bermasyarakat. Tugas pelaku pemberdayaan ialah mendorong dan menciptakan individu serta masyarakat agar mampu melakukan perubahan perilaku ke arah kemandirian (berdaya). Pengembangan masyarakat mempunyai pusat perhatian dalam membantu masyarakat pada tingkatan umur untuk tumbuh dan berkembang melalui berbagai fasilitas dan dukungan agar mereka dapat memutuskan, merencanakan dan mengambil tindakan untuk mengelola dan meningkatkan lingkungan fisik serta kesejahteraan sosialnya (Mardikanto & Soebiato, 2017).

Konsep pemberdayaan selalu dihubungkan dengan dakwah, karena dakwah dan pemberdayaan mempunyai keterkaitan yang cukup signifikan bahkan secara rinci dapat dijelaskan bahwa dakwah ialah proses pemberdayaan masyarakat. Arti dakwah sebagai proses pemberdayaan tidak terlepas atas tiga dimensi dakwah,

yakni makro, mezo, dan mikro. Pemberdayaan pada tingkatan makro yakni berisi hidayah, muatannya murni berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pemberdayaan pada tingkatan mezo integral sebagai hasil penelaahan dari kandungan Al-Qur'an dan Sunnah berupa metodologi yaitu konsep, teori dan kebijakan (Nurdin, 2009).

Terdapat pemberdayaan dalam tingkatan mikro ialah aktualisasi seperti tindakan, kegiatan dan sebagainya yang berbentuk kerja nyata. Jadi, ketiga tingkatan makna dakwah yang diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat merupakan satu kesatuan yang berhubungan antara satu dan lainnya. Ketiganya saling melengkapi sehingga menciptakan satu tujuan yang terpadu untuk meraih keberhasilan. Dalam kaitannya dengan pemberdayaan yakni mengarahkan masyarakatnya pada kemandirian demi terciptanya kemakmuran didalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, pemberdayaan masyarakat berarti tidak bisa dilepaskan dan diserahkan begitu saja kepada masyarakat yang bersangkutan.

### **3. Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat**

Berikut ini adalah peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat:

#### 1) Pemerintah sebagai *Regulator*

Peran Pemerintah sebagai Regulator adalah menyiapkan arah untuk dalam mewujudkan *zero stunting*. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan di masyarakat.

#### 2) Pemerintah sebagai *Dinamisator*

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam mewujudkan *zero stunting*. Sebagai dinamisator pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan dan arahan sangat diperlukan dalam memelihara dinamika. Pemerintah melalui tim penyuluh maupun badan tertentu memberikan bimbingan maupun pelatihan kepada masyarakat. Pemerintah harus memberikan bimbingan dan arahan kepada masyarakat yang ditunjukkan dengan perilaku, sikap, dan cara bekerja yang baik agar menjadi panutan bagi masyarakat dalam mencapai *zero stunting*.

### 3) Pemerintah sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai Fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan proses terwujudnya *zero stunting*. Sebagai fasilitator pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman, termasuk memfasilitasi sarana dan prasarana yang bersangkutan dalam proses mewujudkan *zero stunting* ini, maka pemerintah diharapkan lebih dapat memperhatikan masyarakat.

Pemberdayaan merupakan bagian terpenting yang wajib mendapat perhatian khusus bagi pemerintah. Sebagaimana dalam pemberdayaan pemerintah mempunyai peran serta baik sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator yang tentunya tidak hanya sekedar jadi sebutan semata, namun perlu diimplementasikan agar antara

ucapan dan prakteknya dapat berjalan sesuai dengan harapan. Pemerintah harus jeli melihat keadaan yang terjadi di masyarakat, kemudian selalu mencari alternatif-alternatif lain untuk membantu masyarakat mencari ide atau gagasan yang dapat dijadikan sebagai peluang dalam konteks pemberdayaan.

Stunting menjadi isu besar nasional, pemerintah pusat sampai pemerintah desa turun tangan dan terlibat langsung untuk menangani stunting. Berikut ini secara berjenjang, institusi negara yang menangani stunting:

#### 1. Pemerintah Pusat

Kemenko PMK TI membentuk Tenaga Pendamping Keluarga (TPK) di desa untuk menangani stunting dari hulu hingga hilir, mendampingi orang yang belum menikah (calon Pengantin), ibu hamil sampai dengan balita. Kemendes PDTT meminta pemerintah Desa memfasilitasi Kader Pembangunan Manusia (KPM), membekalinya dengan HP untuk laporan. Badan Pangan Nasional menyalurkan bantuan untuk penanganan stunting dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), walaupun calon penerima By Name By Address (BNBA) ada yang tidak tepat sasaran karena tidak memiliki balita. Dan mungkin kementerian/lembaga nega lain, tapi mungkin belum pernah terdengar kiprahnya.

#### 2. Pemerintah Provinsi

Pemerintah provinsi Memberikan bantuan dana untuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan dana posyandu.

#### 3. Pemerintah Kabupaten

Pemerintah kabupaten meminta PKK untuk terlibat menangani stunting dengan menggandeng Baznas

#### 4. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa wajib mendanai Posyandu Rumah Desa Sehat, KPM dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penurunan stunting.

#### 4. Kebijakan Publik

Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. (Desrinelti et al., 2021) Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideology dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara. Kebijakan publik juga sebagai keputusan tetap yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repetisi) tingkahlaku dari mereka yang membuat dan dari mereka mematuhi keputusan.

Adapun pendapat lain yang mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan terutama dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai '*whatever government choose to do or not to do*'. Artinya, kebijakan publik adalah 'apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan'. Sedangkan menurut Hogwood dan Gunn, 1990 Edi Suharto menyatakan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Ini tidak berarti bahwa makna 'kebijakan' hanyalah milik atau dominan pemerintah saja. (Agustina & Megawati, 2022)

Organisasi-organisasi non-pemerintah, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Sosial (Misalnya Karang Taruna, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga/PKK) dan lembaga-lembaga sukarela lainnya memiliki kebijakan-kebijakan pula. Kebijakan publik memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan (*objective*), sebagai pilihan tindakan yang legal atau sah secara hukum (*authoritative choice*), dan sebagai hipotesis (*hypothesis*).

- a) Kebijakan publik sebagai tujuan Kebijakan publik pada akhirnya menyangkut pencapaian publik. Artinya, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah.
- b) Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal . Pilihan tindakan dalam kebijakan bersifat legal atau otoritatif karena dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Keputusan itu mengikat para pegawai negeri untuk bertindak atau mengarahkan pilihan tindakan atau kegiatan seperti menyiapkan rancangan undang-undang atau

peraturan pemerintah untuk dipertimbangkan oleh parlemen atau mengalokasikan anggaran guna mengimplementasikan program tertentu.

- c) Kebijakan publik sebagai hipotesis. Kebijakan dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan-kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi- asumsi mengenai perilaku. Kebijakan selalu mengandung insentif yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Kebijakan juga selalu memuat disinsentif yang mendorong orang tidak melakukan sesuatu. Kebijakan harus mampu menyatukan perkiraan-perkiraan mengenai keberhasilan yang akan dicapai dan mekanisme mengatasi kegagalan yang mungkin terjadi. (Rushananto, 2014)

Dalam kaitannya dengan definisi-definisi tersebut di atas maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik. Pertama, pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak. Kedua, kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah. Ketiga, kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa yang dimaksud dikerjakan atau akan dikerjakan. Keempat, kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan, secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak

melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan. Kelima, kebijakan publik paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah. (Ramdhani & Ramdhani, 2017)

#### 1. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi kebijakan dari sudut pandang teori siklikal (*cyclical theory*) maka implementasi itu akan diperlukan sebagai suatu tahapan penting yang berlangsung dari proses kebijakan, terutama setelah wacana legal formal, biasanya berupa undang-undang, peraturan, ketetapan, atau bentuk-bentuk produk lainnya, dianggap sudah usai. Dalam arti seluas-luasnya, implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (*stakeholders*), aktor, organisasi (*public atau privat*), prosedur, dan teknik secara sinergistis yang digerakan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang dikehendaki. (Pratama et al., 2023)

Implementasi ini dengan mengatakan bahwa, "Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan faktor perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya

pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian". Selain definisi semacam itu, implementasi kebijakan dapat pula dianggap suatu proses, keluaran (*output*) dan hasil akhir (*outcome*). Berangkat dari logika pemikiran ini, maka implementasi kebijakan dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, serangkaian keputusan (*a serial of decisions*) dan tindakan (*actions*) yang bertujuan melaksanakan keputusan pemerintah atau keputusan legislasi Negara yang telah dibuat atau dirumuskan sebelumnya. (Cristianingsih, 2018)

Implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Sedangkan menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabater, mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. (Anggara Setya Saputra et al., 2022)

## 2. Jaringan Kebijakan

Konsep jaringan (*network*) telah berkembang sejak abad 19, dimana jejaring memiliki arti meliputi atau mencakup dengan jaringan yang terhubung. dan jejaring digunakan untuk dua hal namun kedua dipakai oleh para teoritis jaringan seperti penggunaan kata kerja (*verb*), menyusun jaringan (*to network*) yang artinya menjalin hubungan kontak dalam mencapai tujuan keuntungan. Beberapa pemahaman terkait jejaring kebijakan, namun kembali lagi dari asalnya untuk konteks apa keterkaitannya. (Sudirman et al., 2022) Jaringan kebijakan adalah kelompok organisasi yang terkait ketergantungan akses sumber daya yang dibentuk lebih dari dua organisasi yang saling membentuk hubungan kemudian bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Secara umum bahwa jaring kebijakan dipahami sebagai elemen struktural dari jaringan kolaborasi antar komponen-komponen yang terlibat dalam hubungan timbal balik, keterwakilan dan kesetaraan. Klijn and Koppenjan juga mengamati bahwa konsep jaringan terkait konteks ilmu kebijakan utamanya dalam studi implementasi kebijakan melalui pendekatan “bottom-up” sebagai resistensi terhadap pendekatan “topdown”. Kemudian konsep ini berkembang untuk memetakan hubungan antarorganisasi untuk menilai pengaruh pola-pola terhadap proses kebijakan.

Tahap implementasi kebijakan akan efektif jika pelaksanaannya diiringi identifikasi stakeholder terkait kepentingan dan peran yang didukung dalam strategi organisasi untuk bekerja sama. Jejaring kebijakan hadir untuk

menuntun proses kebijakan dalam hal mencapai tujuan kesejahteraan hidup masyarakat sebagai pencapaian publik. (Letor, 2021) Kemudian Bevir dan Richards mengamati perkembangan konsep jejaring yang semakin terlihat ketika saat didistribusikannya kekuasaan kepada beberapa agen aktor dalam ranah kebijakan tertentu untuk mencapai efektivitas kebijakan. Dapat dikatakan bahwa penyebaran kewenangan, kekuasaan, tugas, fungsi, peran perlu diiringi dengan integrasi atau penyatuan yang dikenal dengan istilah “koordinasi”.

## **5. Perubahan Sosial**

Setiap masyarakat selama hidup mengalami perubahan. Ada perubahan-perubahan yang pengaruhnya terbatas maupun luas, serta ada pula perubahan pengaruh yang lamban tetapi ada juga yang berjalan cepat. Perubahan ini hanya akan ditentukan oleh seseorang yang sempat meneliti susunan dan kehidupan suatu masyarakat pada suatu waktu dan membandingkannya dengan susunan dan kehidupan masyarakat tersebut pada waktu yang lampau. Perubahan terjadi dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan lain sebagainya. (Goa, 2017)

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dunia dewasa ini merupakan gejala yang normal. Konsep perubahan sosial (*social change*) dan konsep perubahan kebudayaan merupakan dua konsep yang sangat penting. Hal ini mudah dimengerti sebab sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang

mempelajari masyarakat dan masyarakat dalam kenyataannya selalu mengalami perubahan. Sosiologi menggunakan konsep proses sosial (*social process*) dan perubahan sosial (*social change*). Proses sosial lebih melihat interaksi yang terjadi antara orang (perorangan maupun kelompok) maupun antara lembaga sosial, sedangkan perubahan sosial lebih melihat pergeseran atau perkembangan-perkembangan yang terjadi akibat interaksi-interaksi tersebut. Sedangkan perubahan kultural adalah perubahan yang berkaitan dengan kebudayaan masyarakat khususnya menyangkut sistem nilai. (Sawali et al., 2023)

Perubahan sosial diartikan sebagai perubahan-perubahan yang menyangkut struktur sosial maupun lembaga-lembaga sosial. Perubahan sosial tidak hanya berkaitan dengan luasnya cakupan perubahan, melainkan juga berkaitan dengan dimensi-dimensi lainnya seperti irama, besaran pengaruh, ataupun kesengajaan dalam proses perubahan. Stzompka menyebutkan bahwa perubahan sosial dapat dipahami sebagai perubahan yang terjadi di dalam atau mencangkup suatu sistem sosial. Lebih tepatnya terdapat perbedaan antara keadaan sistem tertentu dalam jangka waktu berlainan. Sedangkan Mac Iver mengatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam hubungan sosial (*social relation*) atau perubahan terhadap keseimbangan (*equilibrium*) hubungan sosial. Selo soemardjan merumuskan bahwa perubahan sosial sebagai segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memenuhi sistemnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, pola perilaku di antara

kelompok dalam masyarakat. Maka bisa disimpulkan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi di masyarakat yakni menyangkut perubahan pola pikir, nilai-nilai, perilaku dan hubungan antar individu maupun kelompok, organisasi, kultur, kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, penemuan-penemuan baru dalam masyarakat dan sebagainya. (Sevina Yushinta Anjani & Binti Maunah, 2022)

Dalam membahas perubahan yang terjadi hal ini tentu dilihat dari 3 aspek, yakni: kekuatan internal yang ada dalam masyarakat, kekuatan eksternal terutama yang datang dari arus globalisasi, dan program-program pembangunan pemerintah. Kekuatan-kekuatan internal baik kultural maupun strukturalnya, cenderung merupakan kekuatan statis yang sekalipun sering dicap sebagai faktor penghambat perubahan namun sangat menentukan pola adaptasi masyarakat terhadap pengaruh-pengaruh luar. Kekuatan luar yang saat ini umumnya dirumuskan dengan “ arus globalisasi” (yang berintikan sistem kapitalisme modern), merupakan kekuatan pengubah yang sangat besar bagi proses perubahan sosial (social change) yang terjadi. Kekuatan luar lainnya yang diwakili oleh sosok pemerintah umumnya lebih memihak kepada ideologi yang terkandung dalam arus globalisasi itu yakni berkaitan erat dengan proses modernisasi. (Cahyono, 2016)

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia tentu tidak lepas dari peran agen sosial yang juga ikut berperan dalam menjalankan perubahan tersebut. Agen sosial yang ikut berperan dalam perubahan tersebut adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang menjadi

sumber perubahan lembaga-lembaga sosial yang mengatur masyarakat tersebut mengikuti kemana arah perubahan itu. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tiap-tiap individu mempunyai peranan yang sangat kecil dalam perubahan sosial tersebut. Akan tetapi pada waktu yang bersamaan itu pula perubahan sosial harus dipandang sebagai hasil gabungan dari apa yang dikerjakan oleh semua individu. Dalam hal ini lembaga-lembaga sosial juga merupakan agen perubahan, namun kekuatan istimewanya berasal dari masyarakat itu sendiri. Seberapa besar model yang diberikan oleh lembaga sosial atau pengaruh yang masuk, maka masyarakatlah yang memiliki wewenang terbesar untuk menerima atau menolak pengaruh yang masuk tersebut. (Harahap et al., 2021)

a. Pembangunan Manusia

Menurut Todaro modal manusia didefinisikan sebagai investasi yang produktif pada seseorang yang mencakup keterampilan, kemampuan dan kesehatan yang dihasilkan dari adanya pengeluaran untuk pendidikan, program pelatihan kerja dan perawatan kesehatan. Menurut Amartya Sen dalam Kuncoro dalam konteks pembangunan manusia, Sen melihat kapabilitas sebagai kemampuan untuk menggapai dan mewujudkan sesuatu yang dianggap memiliki nilai, paham akan apa yang bisa dilakukan maupun tidak bisa dilakukan. Badan Pusat Statistik Indeks pembangunan manusia merupakan alat untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia yang berbasis pada komponen dasar kualitas hidup. (Azfirmawarman et al., 2023)

Indeks pembangunan manusia dibangun dengan tiga pendekatan dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan standar hidup yang layak. Dimensi kesehatan diukur dengan angka harapan hidup waktu lahir. Sedangkan untuk dimensi pengetahuan diukur dengan gabungan dari indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Dimensi standar hidup yang layak diukur dengan indikator kemampuan daya beli masyarakat. (Wahyu Setiawan & Ariani, 2022)

b. Modal sosial

Menurut Pierre Bourdieu, definisi modal sosial adalah jumlah sumber daya, aktual atau maya, yang berkumpul pada seorang individu atau kelompok karena memiliki jaringan tahan lama berupa hubungan timbal balik perkenalan dan pengakuan yang sedikit banyak terinstitusionalisasikan. James Coleman mendefinisikan social capital yaitu kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama-sama demi mencapai tujuan-tujuan bersama di dalam berbagai kelompok dan organisasi, modal sosial adalah bagian dari kehidupan sosial seperti jaringan, norma, dan kepercayaan yang mendorong partisipan bertindak bersama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Modal sosial secara sederhana sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota-anggota suatu kelompok memungkinkan terjalinnya kerja sama di antara mereka. (Anyualatha Haridison, 2021)

Jika para anggota kelompok itu mengharapkan bahwa anggota-anggota yang lain akan berperilaku jujur dan terpercaya, maka mereka akan saling

mempercayai. Jika orang-orang yang bekerja sama dalam sebuah perusahaan saling mempercayai dan bekerja menurut serangkaian norma etis bersama, maka berbisnis hanya memerlukan sedikit biaya ada tiga tipe modal:

- a. *Sosial Bounding* : berupa kultur nilai, kultur persepsi dan tradisi atau adat istiadat. Modal sosial dengan karakteristik ikatan yang kuat dalam suatu sistem kemasyarakatan di mana masih berlakunya system kekerabatan dengan system klen yang mewujudkan rasa simpati, berkewajiban, percaya resiprositas dan pengakuan timbal balik nilai kebudayaan yang dipercaya. Tradisi merupakan tata kelakuan yang kekal serta memiliki integrasi kuat dalam pola perilaku masyarakat mempunyai kekuatan mengikat dengan beban sanksi bagi pelanggarnya.
- b. *Social Bridging* : berupa institusi maupun mekanisme yang merupakan ikatan sosial yang timbul sebagai reaksi atas berbagai macam karakteristik kelompoknya. Dapat dilihat pula adanya keterlibatan umum sebagai warga Negara, asosiasi, dan jaringan.
- c. *Social Linking* : berupa hubungan/jaringan sosial dengan adanya hubungan diantara beberapa level dari kekuatan sosial maupun status sosial yang ada dalam masyarakat.

Oleh karenanya, Modal sosial adalah salah satu faktor peran penting dalam relasi antara manol, pedagang sayur dan pembeli sayur di STA Jetis, Bandungan, Kabupaten Semarang dan mempengaruhi kelancaran kegiatan ekonomi. Modal sosial yang terjadi antara manol dengan pedagang dan

pembeli yang dimaksudkan diatas adalah sepertikepercayaan, jaringan sosial, dan norma sosial. Dengan adanya modal sosial memungkinkan terjalinnya kerja sama dan membentuk kerukunan dari manol dan pedagang serta pembeli. . Modal sosial terletak pada kemampuan masyarakat yang dalam penelitian ini adalah manol dan pedagang sayuran serta pembeli untuk bekerjasama membangun suatu jaringan guna mencapai tujuan bersama. Kerjasama bersifat timbal balik dan saling menguntungkan. Kerjasama yang terjadi dibangun berdasar atas kepercayaan yang didukung oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial yang kuat.(Rosliana, 2023)

## **6. Kesehatan Masyarakat**

Kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui usaha-usaha masyarakat dalam pengadaan pelayanan kesehatan. Perkembangan kesehatan masyarakat sudah dimulai sebelum berkembangnya ilmu pengetahuan modern. Perkembangan kesehatan masyarakat pada garis besarnya dibagi menjadi dua periode, yaitu sebelum perkembangan ilmu pengetahuan (*prescientific period*) dan sesudah perkembangan ilmu pengetahuan itu berkembang (*scientific period*). (Della Ertiana, 2022)Kesehatan masyarakat yang sampai sekarang masih relevan, yaitu kesehatan masyarakat (*public health*) adalah ilmu dan seni, mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat untuk perbaikan sanitasi lingkungan, pemberantasan penyakit-

penyakit menular, pendidikan untuk kebersihan perorangan, perorganisasian pelayanan medis, perawatan, diagnosis dini, dan pengobatan, pengembangan rekayasa sosial untuk menjamin seap orang terpenuhi kebutuhan hidup yang layak dalam memelihara kesehatan.(Naufal et al., 2023)

## **7. Pengembangan Komunitas**

Pengembangan komunitas merupakan upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Selain itu pengembangan masyarakat juga diartikan sebagai komitmen dalam memberdayakan masyarakat lapis bawah sehingga masyarakat memiliki berbagai pilihan nyata menyangkut masa depan mereka. Pengembangan komunitas berintikan kegiatan sosial yang difokuskan untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Dalam pengembangan masyarakat, batasan antara belajar dan bekerja sangat tipis, karena keduanya berjalan secara terpadu.(Hidayat et al., 2023)

Maka dari itu, pengembangan komunitas dapat diartikan sebagai upaya untuk memungkinkan individu maupun kelompok masyarakat untuk dapat memecahkan masalah-masalah sosial serta memiliki pilihan nyata yang menyangkut masa depannya sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya.(Wahanani Mawasti & Umh Rizky, 2020)

## B. Zero Stunting

Zero Stunting adalah sebuah program yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan Stunting (gangguan pertumbuhan pada anak) di Indonesia. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir. Akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Balita pendek (*stunted*) dan sangat pendek (*severely stunted*) adalah balita dengan panjang badan (PB/U) atau tinggi badan (TB/U) menurut umumnya dibandingkan dengan standar baku WHOMGRS (*Multicentre Growth Reference Study*) 2006. Sedangkan definisi stunting menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) adalah anak balita dengan nilai z-scorenya kurang dari -2SD/standar deviasi (*stunted*) dan kurang dari -3SD (*severely stunted*). (Anwar et al., 2022a)

Kesehatan merupakan suatu hal yang harus dihargai, dijaga, dipelihara dan ditingkatkan oleh setiap individu, yang mana kesehatan adalah salah satu faktor penentu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selain faktor ekonomi dan Pendidikan. Kesehatan juga perlu di perjuangkan, di upayakan dan di tingkatkan oleh setiap individu, keluarga serta masyarakat.

Indonesia termasuk ke dalam 17 negara yang mengalami beban ganda permasalahan gizi. Indonesia masih menghadapi permasalahan gizi yang berdampak serius terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM). Salah satu masalah kekurangan gizi yang masih cukup tinggi di Indonesia terutama masalah pendek (*stunting*) dan kurus (*wasting*) pada balita serta masalah anemia dan kurang

energi kronik (KEK) pada ibu hamil. Masalah kekurangan gizi pada ibu hamil ini dapat menyebabkan berat badan bayi lahir rendah (BBLR) dan kekurangan gizi pada balita, termasuk stunting. (Anwar et al., 2022b)

Hasil dari *South East Asian Nutrition Survey* (SEANUTS) pada tahun 2010-2011 menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah anak balita pendek terbesar, jauh diatas Malaysia, Thailand serta Vietnam. Pada tahun 2010, gambaran tinggi standar anak usia 5 tahun adalah 110 centimeter, namun tinggi rata-rata anak Indonesia umur 5 tahun, kurang 6,7 centimeter untuk anak laki-laki dan kurang 7,3 centimeter untuk anak perempuan.

Ketika memasuki usia 19 tahun, tinggi kurang 13,6 centimeter untuk anak laki-laki dan kurang 10,4 centimeter untuk anak perempuan dari semestinya. Kejadian gagal tumbuh yang terjadi pada usia balita akan berlanjut ke usia berikutnya. Besar kemungkinan ketika mereka menginjak usia 19 tahun, maka tinggi badan optimal tidak tercapai. Mereka akan menjadi manusia dewasa yang pendek dengan keterbatasan untuk berproduktivitas optimal.

Data menunjukkan bahwa masih tingginya angka persentase perempuan usia 15-19 tahun yang tidak melanjutkan sekolah kemudian menikah pada usia dini yang mana usia tersebut sudah masuk pada usia reproduksi dan apabila melahirkan pada usia tersebut maka kemudian dapat kembali melahirkan anak-anak kurang gizi. Saat ini, stunting merupakan salah satu permasalahan yang darurat sehingga harus dilakukan pencegahan ataupun penanganannya dengan tepat, komprehensif dan berkelanjutan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development*

*Index* (HDI) merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, Pendidikan dan keterampilan serta standar hidup layak.

Stunting merupakan suatu kondisi dimana tinggi badan seseorang lebih pendek dibandingkan dengan tinggi badan orang lain yang sesuai pada umumnya. Stunting juga di artikan sebagai kondisi gagal tumbuh pada bayi di usia 0-11 bulan dan pada balita di usia 12-59 bulan yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan.

Kekurangan gizi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir, tetapi kondisi stunting baru nampak setelah anak berusia 2 tahun (Valeriani et al., 2022). Stunting merupakan salah satu hambatan pertumbuhan yang disebabkan oleh masalah kesehatan karena kekurangan asupan zat gizi. Stunting juga merupakan suatu proses yang memiliki dampak pada perkembangan anak mulai dari tahap dini, yaitu saat konsepsi hingga tahun ke-3 atau tahun ke-4 kehidupan anak, dimana keadaan gizi seorang ibu dan anak merupakan faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan anak.

Stunting merupakan salah satu masalah gizi yang diakibatkan karna kekurangan zat gizi secara kronis. Hal ini ditunjukkan dengan indikator tinggi badan menurut umur (TB/U) dengan nilai z-skor dibawah minus 2. Anak yang terkena stunting akan memiliki tingkan kecerdasan tidak maksimal yang berdampak menyebabkan gangguan perkembangan kognitif, meningkatkan resiko terhadap penyakit infeksi, menurunnya tingkat produktivitas dan lebih lanjut kematian.

### a. **Diagnosis dan Klasifikasi Stunting**

Stunting didefinisikan sebagai kondisi balita memiliki tinggi badan menurut umur berada di bawah minus 2 Standar Deviasi ( $< -2SD$ ) dari standar median WHO. Bayi yang dilahirkan memiliki panjang badan lahir normal bila panjang badan lahir bayi tersebut berada pada panjang 48-52 cm. Panjang badan lahir pendek dipengaruhi oleh pemenuhan nutrisi bayi tersebut saat masih dalam kandungan. Penentuan asupan yang baik sangat penting untuk mengejar panjang badan yang seharusnya. Berat badan lahir, panjang badan lahir, umur kehamilan dan pola asuh merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi kejadian stunting. Panjang badan lahir merupakan salah satu faktor risiko kejadian stunting pada balita.

Stunting akan mulai nampak ketika bayi berusia dua tahun. Penilaian status gizi balita yang sering dilakukan adalah dengan cara penilaian antropometri. Secara umum antropometri berhubungan dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat gizi. Antropometri digunakan untuk melihat ketidakseimbangan asupan protein dan energi. Beberapa indeks antropometri yang sering digunakan adalah berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U), berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) yang dinyatakan dengan standar deviasi unit Z (*Z-score*) dimana hasil pengukuran antropometri menunjukkan *Z-score* kurang dari  $-2SD$  sampai dengan  $-3SD$  (*pendek/stunted*) dan kurang dari  $-3SD$  (*sangat pendek / severely stunted*).

Stunting dapat diketahui bila seorang balita sudah ditimbang berat badannya dan diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar, dan hasilnya berada dibawah normal. Jadi secara fisik balita akan lebih

pendek dibandingkan balita seumurnya. Penghitungan ini menggunakan standar Z score dari WHO. Normal, pendek dan sangat pendek adalah status gizi yang didasarkan pada indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) yang merupakan padanan istilah *stunted* (pendek) dan *severelystunted* (sangat pendek).

## **b. Faktor-faktor Penyebab Stunting**

### **1. Berat Badan Lahir Rendah**

Bayi yang lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR) yaitu bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gram, bayi dengan berat badan lahir rendah akan mengalami hambatan pada pertumbuhan dan perkembangannya serta kemungkinan terjadi kemunduran fungsi intelektualnya selain itu bayi lebih rentan terkena infeksi dan terjadi hipotermi.

Bayi yang berat lahirnya kurang dari 2.500 gram akan membawa risiko kematian, gangguan pertumbuhan anak, termasuk dapat berisiko menjadi pendek jika tidak ditangani dengan baik. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Tiwari yang menyatakan bahwa anak dengan riwayat kelahiran BBLR berisiko menderita stunting dibandingkan dengan anak yang tidak menderita BBLR.

Berat badan lahir sangat terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan jangka panjang anak balita, pada penelitian yang dilakukan oleh Lidia menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara berat lahir dengan kejadian stunting pada balita di Pekanbaru. Penelitian yang dilakukan oleh (Sartono, 2013) di Yogyakarta tentang hubungan antara BBLR dengan kejadianstunting diantaranya menyatakan hal yang sama bahwa ada hubungan antara berat badan lahir dengan kejadian stunting.

## 2. ASI Eksklusif

ASI Eksklusif adalah pemberian ASI yang diberikan sejak bayi dilahirkan hingga usia bayi enam bulan tanpa memberikan makanan atau minuman lainnya seperti susu formula, air putih, air jeruk kecuali vitamin dan obat. Bayi atau balita dalam praktek pemberian ASI eksklusif maupun MPASI yang kurang optimal dan terbatasnya makanan dalam hal kualitas, kuantitas dan jenis akan memberikan kontribusi terhadap stunting.

Pada bayi Air Susu Ibu (ASI) sangat berperan dalam pemenuhan nutrisinya. Konsumsi ASI juga meningkatkan kekebalan tubuh bayi sehingga menurunkan risiko penyakit infeksi. Kadar mineral pada ASI tidak dipengaruhi oleh makanan yang dikonsumsi ibu dan status nutrisi ibu. Mineral dalam ASI lebih mudah diserap dibanding mineral dalam susu sapi. Mineral utama yang terdapat pada ASI adalah kalsium yang berfungsi untuk pertumbuhan jaringan otot dan rangka, transmisi jaringan saraf dan pembekuan darah. Hal inilah yang mendukung pertumbuhan bayi terutama tinggi badan sehingga bayi yang diberikan ASI juga memiliki tinggi badan yang lebih tinggi dan sesuai dengan kurva pertumbuhan dibandingkan dengan bayi yang diberikan dengan susu formula. Dengan pemberian ASI, bayi dapat terhindar dari resiko stunting. Menyusui yang berkelanjutan selama dua tahun memberikan kontribusi signifikan terhadap asupan nutrisi penting pada bayi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sri di Sleman terdapat hubungan pemberian ASI eksklusif dengan kejadian stunting pada balita dua sampai tiga tahun. ASI merupakan asupan gizi yang sesuai dengan kebutuhan akan membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Bayi yang tidak mendapatkan ASI dengan

cukup berarti memiliki asupan gizi yang kurang baik dan dapat menyebabkan kekurangan gizi salah satunya dapat menyebabkan stunting.

### 3. Tinggi Badan Ibu

Karakteristik ibu atau keadaan ibu yang meliputi tinggi badan merupakan faktor genetika yang menyebabkan stunting. Orangtua yang memiliki tinggi badan yang pendek kemungkinan besar akan menurunkan sifat pendek tersebut terhadap anaknya. Hal ini dikarenakan adanya kondisi patologis yaitu defisiensi hormon pertumbuhan yang dimiliki oleh gen pembawa kromosom tersebut, apabila tidak didukung dengan asupan yang adekuat untuk menyokong pertumbuhan, pada generasi berikutnya akan berdampak terhadap kegagalan pertumbuhan atau stunted.

Menurut (Kemenkes RI, 2010) anak yang lahir dari ibu dengan tinggi badan kurang dari 150 cm cenderung melahirkan bayi pendek lebih banyak (42,2%) dibandingkan kelompok ibu dengan tinggi badan normal (36%). Menurut penelitian yang dilakukan di Ghana dengan sampel anak berusia dibawah lima tahun menunjukkan bahwa anak yang memiliki ibu dengan tinggi badan kurang dari 150 cm berisiko menderita stunting. Salah satu atau kedua orang tua yang pendek akibat kondisi patologi (seperti defisiensi hormon pertumbuhan) memiliki gen dalam kromosom yang membawa sifat pendek sehingga memperbesar peluang anak mewarisi gen tersebut dan tumbuh menjadi stunting.

### 4. Tingkat Pendidikan

Menurut Undang – Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar (SD, MI, SMP, dan MTs),

pendidikan menengah pertama (SMA, MA, SMK), dan pendidikan tinggi (diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor). Pemerintah di Indonesia mewajibkan belajar sembilan tahun untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Sehingga masyarakat di Indonesia harus menempuh pendidikan minimal sembilan tahun dihitung mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP). Masyarakat yang sudah menempuh pendidikan minimal sembilan tahun tersebut dianggap sudah mempunyai kualitas yang layak untuk menjalankan kehidupannya. Ibu dengan tingkat pendidikan tinggi cenderung memiliki pengetahuan yang luas dan mudahnya menangkap informasi baik dari pendidikan formal yang mereka tempuh maupun dari media massa (cetak dan elektronik) untuk menjaga kesehatan anak dalam mencapai status gizi yang baik sehingga perkembangan anaknya menjadi lebih optimal.

#### 5. Status ekonomi

Status sosial ekonomi dapat mempengaruhi terjadinya kejadian stunting, karena keadaan sosial ekonomi atau keadaan rumah tangga yang tergolong rendah akan mempengaruhi tingkat pendidikan rendah, kualitas sanitasi dan air minum yang rendah, daya beli yang rendah serta layanan kesehatan yang terbatas, semuanya dapat berkontribusi terkena penyakit dan rendahnya asupan zat gizi sehingga berpeluang untuk terjadinya stunting. Tingkat pendapatan keluarga memiliki hubungan yang bermakna dengan kejadian stunting. Hal ini dikarenakan keluarga dengan pendapatan yang rendah akan mempengaruhi dalam menyediakan pangan untuk keluarga. Daya beli keluarga tergantung dengan pendapatan keluarga,

dengan adanya pendapatan yang tinggi maka kemungkinan terpenuhinya kebutuhan makan bagi keluarga.

### **c. Dampak Stunting**

Dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh masalah gizi pada periode tersebut, dalam jangka pendek adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Sedangkan dalam jangka 24 panjang akibat buruk yang dapat ditimbulkan adalah menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, dan risiko tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua, serta kualitas kerja yang tidak kompetitif yang berakibat pada rendahnya produktivitas ekonomi. Masalah gizi, khususnya anak pendek, menghambat perkembangan anak muda, dengan dampak negatif yang akan berlangsung dalam kehidupan selanjutnya.

Studi menunjukkan bahwa anak pendek sangat berhubungan dengan prestasi pendidikan yang buruk, lama pendidikan yang menurun dan pendapatan yang rendah sebagai orang dewasa. Anak-anak pendek menghadapi kemungkinan yang lebih besar untuk tumbuh menjadi orang dewasa yang kurang berpendidikan, miskin, kurang sehat dan lebih rentan terhadap penyakit tidak menular. Oleh karena itu, anak pendek merupakan prediktor buruknya kualitas sumber daya manusia yang diterima secara luas, yang selanjutnya menurunkan kemampuan produktif suatu bangsa di masa yang akan datang.

Stunting memiliki konsekuensi ekonomi yang penting untuk laki-laki dan perempuan di tingkat individu, rumah tangga dan masyarakat. Bukti yang menunjukkan hubungan antara perawakan orang dewasa yang lebih pendek dan hasil pasar tenaga kerja seperti penghasilan yang lebih rendah dan produktivitas yang lebih buruk (Hoddinott et al, 2013). Anak-anak stunting memiliki gangguan perkembangan perilaku di awal kehidupan, cenderung untuk mencapai nilai yang lebih rendah, dan memiliki kemampuan kognitif yang lebih buruk daripada anak-anak yang normal.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Pendekatan Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, menurut Prof. Dr. Sugiyono Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistic, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang berpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditentukan di lapangan (Poerwandari, 2011).

Menurut Poerwandari penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto rekaman video dan lain-lain. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang sifatnya abstrak tentang kenyataan-kenyataan Dalam penelitian kualitatif peneliti adalah instrumen. Validitas dan metode-metode kualitatif banyak bergantung pada keterampilan, kemampuan, dan kecermatan yang melakukan kerja lapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan,

fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya.

## **B. Sumber Data**

Berdasarkan metodologi penelitian di atas, maka sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu dari primer dan data sekunder.

### **1. Data Primer**

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap pemberi informasi sumber data primer penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan pihak pemerintah yaitu kepala desa kampung sialang baru yaitu bapak Ma'nun, serta 5 orang masyarakat kampung sialang baru kabupaten siak yaitu bapak Miswanto (Kadus), Yuni (Bidan Desa), Siti Moniaro (Masyarakat), Solifah (Kader Posyandu) dan Fikri (RT) yang dijadikan sebagai informan. Teknik purposive sampling ini adalah teknik mengambil informan atau narasumber dengan tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian dan Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Dalam hal ini peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan dikaji serta mampu memberikan informasi yang dapat dikembangkan untuk memperoleh data

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diberikan kepada peneliti, misalnya peneliti mendapatkan data melalui orang lain atau mencari melalui

dokumen. Data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari buku, internet, dan data pendukung lain seperti arsip dan dokumen tertulis lainnya.

### **C. Tempat dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian dalam penelitian ini dilakukan di Kampung Sialang Baru kabupaten SiaK dan waktu Penelitian ini dirancangan pada penelitian ini dimulai dari bulan Januari 2024 dan diperkirakan selesai Maret 2024.

### **D. Subjek dan Objek**

Subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kampung Sialang Baru Kabupaten Siak. Sedangkan objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya. Objek penelitiannya adalah Masyarakat Kampung Sialang Baru Kabupaten Siak.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

#### **a. Interview atau Wawancara**

Interview atau wawancara adalah proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan dengan satu orang kepala pemerintah kampung sialang baru dan 5 orang masyarakat atau lebih bertatap muka serta mendengar secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Metode interview atau wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi dari kepala pemerintah kampung sialang

baru tentang Peran Pemerintah Kampung Sialang Baru Untuk Mewujudkan Zero Stunting kabupaten Siak.

b. Dokumentasi

Data ini diperoleh melalui penyelidikan benda-benda tertulis, seperti buku-buku, jurnal, majalah serta tentang arsip administrasi. Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang sesuai dengan kajian penelitian, terutama dokumen-dokumen yang dimiliki oleh kepala pemerintahan kampung sialang baru kabupaten siak .Dokumen yang dimaksud disini yaitu dokumen yang berbentuk foto saat wawancara. Dokumentasi sendiri adalah teknik yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara mempelajari, mencatat arsip atau data yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti sebagai bahan menganalisis permasalahan. Dokumentasi dalam penelitian ini lebih fokus pada pengumpulan dokumentasi pendukung data-data penelitian yang dibutuhkan (Soehartono, 2004). Dokumen tersebut dapat berupa lisan yang dilakukan saat wawancara pada wawancara maupun gambar yang terkait dengan penelitian tentang Peran pemerintah dalam mewujudkan zero stunting.

**F. Teknik Analisa Data**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif murni analisis kualitatif yaitu Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya.

Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan 2 keadaan / lebih, hubungan antarvariabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain. masalah yang diteliti dan diselidiki oleh penelitian deskriptif kualitatif mengacu pada studi kuantitatif, studi komparatif, serta dapat juga menjadi sebuah studi korelasional 1 unsur bersama unsur lainnya. Biasanya kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data, menganalisis data, menginterpretasi data, dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang mengacu pada penganalisisan data tersebut.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep Milles dan Huberman yang disebut sebagai model interaktif yang mengklasifikasikan analisis data dalam beberapa langkah yaitu:

#### 1. Pengumpulan data

Pengumpulan data yaitu pengumpulan data-data yang berkaitan dengan tujuan peneliti yaitu mengenai pelaksanaan penelitian. Pengumpulan data ini dilakukan peneliti dengan membuat catatan data yang dikumpulkan melalui wawancara di lapangan.

#### 2. Reduksi data

Reduksi data yaitu suatu proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data dasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang perlu direduksi oleh peneliti yaitu hasil wawancara di lapangan dan dokumentasi yang telah mencapai final untuk diverifikasi.

### 3. Penyajian data

Data ini tersusun sedemikian rupa sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, dengan mencermati penyajian ini, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan, adapun bentuk yang lazim digunakan pada data kualitatif adalah dalam bentuk teks naratif. Data dan informasi yang didapat di lapangan disajikan sesuai data yang diperoleh dalam penelitian di lapangan sehingga peneliti akan dapat menguasai data dan tidak salah dalam menganalisis data serta menarik kesimpulan. Penyajian data bertujuan untuk menyederhanakan informasi yang kompleks menjadi data yang sederhana sehingga lebih mudah untuk dipahami.

### 4. Penarikan kesimpulan (*verifikasi*)

Dalam penelitian ini akan diungkap mengenai makna dari data yang dikumpulkan. Dari data tersebut akan diperoleh kesimpulan yang tentatif, kabur, kaku dan meragukan, sehingga kesimpulan tersebut perlu diverifikasi. Verifikasi dilakukan dengan melihat kembali reduksi data maupun display data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang (Joko Subagyo, 2015). Dan penarikan kesimpulan pada penelitian ini adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola kejelasan, dan alur sebab akibat atau proporsisi. Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi Penelitian**

Desa Sialang Baru Kecamatan Lubuk Dalam berdiri pada tahun 2002 dengan jumlah penduduk 3291 jiwa. Laki-laki 1610 jiwa dan Perempuan 1680 jiwa. Desa Sialang Baru ini dengan luas wilayah 19.64 ha dengan jumlah Kadus / 3 (tiga) yaitu Kadus 1 Bringin kadus 2 Pringading kadus 3 Lancang kuning.terdiri dari RK 6 dan RT 21. Pekerjaan masyarakat mayoritas di Desa Sialang Baru kecamatan lubuk dalam adalah petani kelapa sawit yang mana Desa Sialang Baru kecamatan lubuk dalam adalah bekas transmigrasi dengan suku yang banyak Jawa dan ada juga Batak, Melayu, Minang, Nias

#### **B. Peran Pemerintah dalam Memberdayakan Masyarakat Untuk Mewujudkan Zero Stunting di Kampung Sialang Baru Kabupaten Siak**

##### **c. Sosialisasi tentang perencanaan dan anggaran dana**

Perencanaan dan penganggaran dana adalah berasal dari kata rencana, yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Perencanaan adalah suatu rangkaian persiapan tindakan untuk mencapai tujuan. Perencanaan merupakan pedoman, garis besar, atau petunjuk yang harus dituruti jika menginginkan hasil yang baik. Perencanaan dan penganggaran dana pemerintah merupakan proses yang terintegrasi sehingga output dari perencanaan keuangan adalah penganggaran.

Perencanaan dan penganggaran dana dalam hal ini melibatkan seluruh Masyarakat yang ada di Kampung Sialang Baru, dimana tahap awal dari proses

perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan cara musyawarah masyarakat. Perencanaan dan penganggaran dana merupakan proses yang terintegrasi sehingga output dari perencanaan keuangan desa adalah penganggaran. Sebelum dilakukan musyawarah oleh masyarakat, dilakukan rembuk stunting yang melibatkan pemerintah desa, badan Permusyawaratan Desa (BPD), kader kesehatan desa, Kader Pembangunan Manusia (KPM), tokoh masyarakat. Rembuk stunting merupakan salah satu rangkaian permusyawaratan desa untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa tahun selanjutnya. Setelah dilakukan rembuk stunting, hasil dari rembuk stunting tersebut akan dilakukan musyawarah Masyarakat Kampung Sialang Baru untuk penyusunan perencanaan pembangunan desa tahun berikutnya. Penganggaran disusun untuk masa 1 (satu) tahun anggaran. Pemerintah juga harus lebih memperhatikan masyarakat terutama ibu hamil serta balita agar terhindar dari stunting. Anggaran ini dipergunakan untuk posyandu dengan meningkatkan fasilitas kesehatan agar lebih memadai, pemenuhan asupan gizi seperti PMT, susu, vitamin untuk ibu hamil dan balita. Seperti penuturan dari Ibu Yuni selaku bidan desa petugas di puskesmas di Kampung Sialang Baru:

“Kami diarahkan untuk bekerjasama antar instansi, mewajibkan penimbangan harus 90%, mengajak rapat Bapak Camat, Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPKK), puskesmas dan penghulu di Kabupaten Petugas gizi, promkes, kesling, dokter dan bikord Puskesmas. di kampung ada penghulu dan perangkat kampung terkait, Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPKK) kampung dan anggota, Bidan Desa, Kepala. Pustu, kader kesehatan, kader Kader Pembangunan Manusia (KPM) karena dari kecamatan juga sudah ada Surat Kerja tim penanggulangan stunting, stau saya di kampung juga di minta buat menangani permasalahan stunting dan untuk pengetahuan terkait stunting kader sudah memahami dan tau tugas pokoknya sebagai kader kesehatan, tapi tahun ini ada perubahan kebijakan dari kemenkes terkait 25 tanda kecakapan kader, ini baru sekedar sosialisasi dan sudah ada yg dilatih dari Dinkes Kabupaten Siak, cuma untuk penilaian belum di lakukan dan pemerintah juga membuat program

peningkatan gizi masyarakat melalui program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk meningkatkan status gizi anak”

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa dilihat dari proses sosialisasi sudah dilakukan dengan baik yakni dengan melalui musyawarah terlebih dahulu dengan melibatkan banyak orang untuk mengambil suatu keputusan.

d. Peningkatan Kualitas Pelayanan

Peningkatan kualitas pelaksanaan dalam penanggulangan stunting sangat penting, karena dengan ditingkatkan kualitas pelaksanaan ini mampu membantu dalam pencegahan serta penanganan terhadap stunting dan hal ini mempermudah untuk mewujudkan zero stunting. Menurut keterangan seluruh informan, cara mereka untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan ini adalah dengan melakukan kerjasama antar pemerintah desa dengan Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu, Tim Pendamping Keluarga (TPK). Tim Pendamping Keluarga (TPK) ini adalah tim yang terdiri dari bidan desa, kader (Keluarga Berencana) KB, dan kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Cara meningkatkan kualitas pelaksanaan lainnya adalah dengan kunjungan ke rumah-rumah apabila balita tidak hadir pada kegiatan di posyandu untuk ditimbang berat badan dan tinggi badan. Dari posyandu melakukan sosialisasi dengan memberikan pemahaman tentang stunting ini setiap bulan dalam kegiatan di posyandu kepada ibu hamil, ibu menyusui dan ibu yang memiliki anak balita yang berguna untuk menambah pemahaman si ibu tentang stunting ini. Strategi yang dilakukan dalam penanggulangan stunting oleh pemerintah di Kampung Sialang Baru Kecamatan

Lubuk Dalam menjaga kebersihan lingkungan, menjaga pola asuh anak, menjaga pola makan atau asumsi makanan ibu dan anak, dilakukan pemeriksaan berkala kepada ibu hamil dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada ibu dan anak balita, pemberian tablet tambah darah kepada ibu hamil, susu untuk ibu hamil yang dibantu oleh posyandu. Pemerintah di Kampung Sialang Baru Kecamatan Lubuk Dalam juga sudah menyediakan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat desa. Seperti penuturan Bidan Yuni di kampung Sialang Baru yaitu:

“Kami dijadwalkan rutin untuk melakukan kegiatan sosialisasi, ini juga di berikan wewenang oleh pemerintah kepada kepala desa untuk mengawal nya supaya berjalan lebih efektif. daan ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka stunting yang dapat membahayakan anak dimasa kini dan dimasa depan dan dengan melakukan penyuluhan di dan sosialisasi baik di puskesmas, posyandu dan langsung dating ke rumah-rumah Masyarakat, seryta memberikan edukasi terkait masalah gizi, pola asuh, lingkungan dan kegiatan dilaksanakan secara rutin. Sarana dan prasarana dan sumber daya dalam pelaksanaa posyandu juga sudah mencukupi, karena kader mendapat pelantikan dan sosialisasi untuk mewujudkan Zero Stunting ini”

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa kerjasama antar pemerintah dengan Bapak Camat, Tim Pencegah dan penanganan Kekerasan (TPPKK), Puskesmas dan kepala desa, Petugas Gizi, Promkes, Kesling, Dokter dan Bikord Puskesmas. Perangkat Kampung terkait, TPPKK Kampung dan Anggota, Bidan Desa, Ka. Pustu, Kader Kesehatan, Kader KPM dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan dalam mewujudkan zero stunting. Pada tahapan sosialisasi hanya dilakukan pada setiap kegiatan posyandu untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu yang memiliki anak balita. Namun, tidak ada sosialisasi dari pemerintah ke masyarakat hanya saja difasilitasi meskipun hanya sebagian.

e. Peningkatan Kualitas Pemantauan

Evaluasi dan Pelaporan menurut keterangan informan pemantauan dilakukan oleh pemerintah melalui Kader Pemberdayaan Manusia (KPM) dan posyandu. Proses pemantauan dilakukan di posyandu dengan melakukan pemantauan bulanan terhadap ibu hamil, pemantauan bulanan baduta, pemantauan layanan dan sasaran PAUD anak. Posyandu juga melakukan penimbangan berat badan, pengukuran tinggi pada anak balita untuk dapat mengetahui mana anak yang terkena stunting dan mana yang tidak. Untuk mengukur tinggi badan dipantau setiap 6 bulan sekali yaitu setiap bulan februari dan agustus waktu pemberian vitamin. Seperti penuturan ibu Solipah selaku kader posyandu Kampung Sialang Baru:

“Masyarakat di undang untuk menghadiri kegiatan-kegiatan seperti penyuluhan untuk cegah stunting baik yang dilaksanakan oleh kampung atau puskesmas dan para kader membantu para bidan dalam pengukuran tinggi dan penimbangan berat badan pada anak dan juga ibu. Melatih kader dalam hal pengukuran, administrasi posyandu dan hal-hal terkait stunting lainnya pengecekan yang dilakukan dua kali dalam sebulan kami juga menjelaskan kepada ibi agar memenuhi kebutuhan seperti nabati dan hewani, dan makanan yang memiliki angka kecukupan gizi lainnya dan makana diolah dengan bervariasi agar tidak membosankan”.

Dari pernyataan diatas, pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait yaitu pembinaan dan sosialisasi terhadap balita yang terkena kasus Stunting sudah mencapai tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan dalam mewujudkan Zero Stunting di Kampung Sialang Baru Sejauh ini zero stantung sudah terwujud atau berjalan efektif meskipun belum seratus persen.

**C. Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Pemerintah dalam Memberdayakan Masyarakat untuk Mewujudkan Zero Stunting Di Kampung Sialang Baru Kabupaten Siak**

Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak adalah salah satu daerah di provinsi Riau dengan angka stunting yang begitu banyak. Program mewujudkan zero stunting merupakan langkah Pemerintah Indonesia untuk menurunkan angka stunting secepat mungkin. Hingga 2024 nanti angka anak stunting ditargetkan menurun. Oleh karena itu berbagai pihak dan otoritas dari tingkat kementerian hingga daerah memiliki kewenangan dan tugas masing-masing dalam pencegahan stunting. Untuk mencapai keberhasilan dalam mencapai tujuan sebuah program tentu diperlukan partisipasi dari masyarakat itu sendiri.

Dalam penelitian ini mengenai zero stunting ini sendiri tentu masyarakat harus berperan secara aktif demi terwujudnya zero stunting di kecamatan Lubuk Dalam. Melalui usaha atau program yang dilaksanakan, peran pemerintah dalam mewujudkan zero stunting tidak akan berjalan dengan baik apabila masyarakat tidak berpartisipasi secara aktif untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan dan melaksanakan arahan yang telah diberikan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan zero stunting di Kampung Sialang Baru Kabupaten Siak. Analisis ini dilakukan berdasarkan faktor penghambat partisipasi masyarakat menurut dan faktor pendukung partisipasi masyarakat. Adapun uraian dari setiap faktor antara lain:

#### **Faktor Pendukung Mewujudkan Zero Stunting**

##### a) Adanya Kemauan

Adanya kemauan masyarakat menurut menyatakan adanya kemauan masyarakat untuk turut berpartisipasi akan mendorong seseorang untuk terlibat dalam kegiatan. Dalam hal ini masyarakat yang anaknya stunting di Kampung

Sialang Baru, memiliki kemauan untuk ikut serta dalam mensukseskan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan zero stunting ini. Adanya kemauan tersebut didasari dari banyaknya edukasi dan sosialisai yang dilaksanakan pihak posyandu maupun puskesmas, kecamatan hingga mampu mewujudkan zero stunting ini. Berdasarkan hasil observasi peneliti, adanya kemauan dari masyarakat untuk ikut pada kegiatan-kegiatan mewujudkan zero stunting karena masyarakat mengikuti arahan dari pihak terkait.

Kemauan masyarakat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan inilah yang menjadikan masyarakat bekeinginan manfaat dari program yang diikuti seperti apa yang akan didapat oleh mereka setelah program berakhir seperti penambahan gizi dan makanan untuk balita. Adanya kemauan mengikuti program sendiri diutarakan oleh ibu balita stunting yang selalu menghadiri kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan stunting, sebagai berikut:

Seperi penuturan ibu Siti munaroh selaku ibu balita stunting di Kampung Sialang Baru yaitu:

“Iya kalo ada acara-acara apa gitu di puskesmas itu ya ikut terus kalo tidak ada halangan atau urusan, saya dateng terus kok pak kalo diundang kan ya kita pasti datang ya. Kemarin itu ada acara dipuskesmas kan anak-anak stunting main gitu disana terus dikasih makan sama pulangny masih dikasih lagi”

Harapan untuk mendapatkan manfaat dari program inilah yang menjadi motivasi masyarakat untuk terus mengikuti rangkaian-rangkain kegiatan inovasi dalam mewujudkan zero stunting di kampung Sialang Baru. Masyarakat tentu berharap anaknya bisa segera sembuh dari stunting namun penerimaan manfaat selain kesembuhan yaitu dengan adanya bantuan dari lintas sektor juga menjadi

motivasi masyarakat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada seperti sembako atau makanan untuk balitanya.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat dari Kepala Puskesmas Kampung Sialang Baru bahwa masyarakat memiliki kecenderungan untuk sekedar mengikuti kegiatan yang ada tanpa menerapkan intervensi yang telah diberikan pada kehidupan sehari-hari. Selain itu melalui hasil observasi ditemukan bahwa adanya kemauan ibu untuk ikut serta dalam menghadiri kegiatan mewujudkan zero stunting sendiri terbatas pada arahan dan himbauan untuk mengikuti kegiatan karena selama kegiatan berlangsung keaktifan ibu dirasa kurang dan setelahnya pun didapati tidak adanya tindak lanjut untuk menerapkan intervensi yang telah diberikan pada kehidupan balita sehari-hari. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya kemauan dari masyarakat untuk ikut serta merupakan faktor pendukung untuk mempercepat mewujudkan zero stunting di kampung Sialang Baru Kecamatan Lubuk Dalam.

b) Adanya Kemampuan

Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi adalah ketika masyarakat mengikuti kegiatan atau program yang tidak terlepas dari kesadaran dan keyakinan masyarakat itu sendiri untuk mampu mengikuti rangkaian program. Dalam hal ini masyarakat dirasa mampu untuk mengikuti program-program yang ada untuk menuju zero stunting, seperti yang disampaikan Ibu Solipah selaku Kader Posyandu berikut:

“Kalo untuk masyarakatnya sendiri itu kami rasa mampu dan berkenan ya buat ikut-ikut seperti kalo ada acara di puskesmas sosialisasi stunting itu kan ibu nya datang ya, tapi mampu disini bukan soal materi yakan pak? Kalo mampu soal waktu terus mampu ke puskesmas ya iya mampu”.

Kemampuan dalam berpartisipasi tentu memuat banyak hal bisa saja karena kemampuan masyarakat dalam menyumbangkan harta benda atau meluangkan waktu untuk mengikuti berbagai kegiatan inovasi yang ada untuk mewujudkan zero stunting di Kampung Sialang Baru Kecamatan Lubuk Dalam.

c) Adanya Kesempatan

Adanya Kesempatan Faktor merupakan pendukung dalam partisipasi masyarakat yang terakhir adalah adanya kesempatan, dimana masyarakat memiliki kesempatan dalam berpartisipasi tidak terlepas dari peran lintas sektoral dalam penyelenggaraan program untuk memberikan ruang masyarakat dalam berpartisipasi. Dalam hal ini Puskesmas Kampung Sialang Baru Kecamatan Lubuk Dalam, Pihak Kelurahan, hingga Kader posyandu dan pihak-pihak lainnya sebagai lintas sektor berperan penting dalam memberikan kesempatan untuk masyarakat ikut serta seperti penjelasan Bidan Yuni mengatakan, seperti berikut:

“Sekarang ini bentuk kordinasi lintas sektoral itu sudah sangat bagus ya, apalagi kecamatan sangat support, kelurahan juga membantu, karena ini kan program nya pemerintah ya, stunting itu sendiri gabisa diselesaikan oleh posyandu dan puskesmas saja, karena itu banyak faktor yang jelas disini (salah satunya) faktor ekonomi yang pasti dan jelas menjadi faktor terpenting yang mempengaruhi dalam stunting ya, karena itu kan kita selalu monitoring ya ke kelurahan dan kecamatan”.

Lebih lanjut Bapak Ma'nun selaku Kepala Desa kampung Sialang baru menyebutkan seperti berikut:

“Jika ada permasalahan seperti yang tadi sudah dibahas dalam sosialisasi itu ya kami akan mengupayakan setelah ini masyarakat yang memang kehidupannya dibawah sekali atau masih buruh kasar ya kebanyakan itu nanti kami upayakan untuk ikut di Kampung Sialang Baru Kecamatan Lubuk Dalam”

Adanya kesempatan merupakan faktor pendukung untuk mewujudkan zero stunting dimana dapat dilihat bahwa kordinasi lintas sektor yang terjadi antara pihak kelurahan, puskesmas hingga kader terjadi sangat baik untuk menyediakan kebutuhan masyarakat dalam mengentaskan stunting. Masyarakat mendapat kesempatan untuk mengikuti rangkaian kegiatankegiatan yang ada dalam mewujudkan zero stunting karena adanya upaya-upaya yang dilaksanakan berdasarkan koordinasi lintas sektoral, serta mendapat bantuan-bantuan dari pihak-pihak yang telah diajak bekerjasama dengan pihak puskesmas dan kelurahan untuk masyarakat.

### **Faktor Penghambat Mewujudkan Zero Stunting**

#### a) Faktor Pekerjaan

Pekerjaan dalam keikutsertaan masyarakat merupakan salah satu faktor yang melatar belakangi keikutsertaan masyarakat dalam suatu program karena pekerjaan masyarakat yang berdampak pada penghasilan sehingga berpengaruh pada keinginan masyarakat untuk ikutserta. Minimnya rata-rata pendapatan dan banyaknya tanggungan keluarga balita stunting di Kampung Sialang Baru menyebabkan ketidakmampuan orang tua dalam berpartisipasi mengikuti arahan dari penyelenggara untuk memberikan makanan dengan gizi seimbang yang baik pada balita. Seperti penuturan dari ibu Siti Moniaroh selaku ibu balita yang terkena stunting berikut:

“Pendapatan saya yang tidak sesuai dengan pengeluaran pak, apalagi saya sebagai ibu yang ngurus anak-anak sendiri. Suami saya memang bekerja sebagai wiraswasta akan tetapi tidak mampu menutyupi kebutuhan kami. hal ini jugalah yang menyebabkan saya tidak rutin juga mengikuti penyelenggaraan programnya pak, karena terbatasnya biaya juga untuk melakukan pengecekan dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang

bahaya stunting dan biasanya ada juga yang rutin ada yang tidak, hal ini karena terbatasnya biaya untuk melakukan pengecekan dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya stunting”

Dari hasil wawancara ini diketahui bahwa masyarakat di kampung Sialang Baru, merupakan masyarakat berpenghasilan rendah sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup susah. Hal ini menjadi faktor penghambat yang serius, karena ketidakmampuan orang tua dalam memberikan gizi seimbang pada balita disebabkan oleh faktor ekonomi. Selain itu, pembelian lauk dan buah hanya dilaksanakan beberapa kali jika memang ada uang lebih untuk belanja. Pola makan pada balita stunting juga tidak ada perubahan, tidak seperti seharusnya dimana anak yang terkena stunting membutuhkan makanan dengan gizi seimbang.

Dari hasil observasi juga ditemukan bahwa masyarakat dengan balita stunting sebagian besar masih tinggal menumpang dengan nenek atau kakek balita stunting. Selain itu tidak hanya tinggal dengan kakek atau nenek beberapa keluarga balita bahkan harus tinggal dengan keluarga lain dari anak kakek atau nenek tersebut. Tidak hanya itu beberapa rumah balita stunting merupakan rumah yang mengontrak hingga ada rumah yang tidak layak huni.

#### b) Faktor Pendidikan

Selain faktor ekonomi tingkat pendidikan juga sangat berpengaruh dalam mewujudkan zero stunting. Dari kasus ini kebanyakan orangtua yang memiliki anak penderita stunting adalah ibunya yang memiliki latar belakang Pendidikan yang rendah yaitu hanya sebatas SD. Hal ini menyebabkan ketidak tahuan ibu akan pencegahan stunting inilah yang kemudian menyebabkan anak terkena stunting bahkan hingga bertahun-tahun. Sedangkan ibu dengan tingkat pendidikan

tinggi akan lebih mudah menyerap informasi yang berkaitan dengan kesehatan dari pada ibu dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah sehingga mereka dapat lebih mudah untuk menerapkan informasi yang telah diberikan pada kehidupan sehari-hari. Dari beberapa responden yang saya teliti ada yang tidak mengetahui bagaimana pencegahan stunting. Seperti yang dipaparkan oleh Yuni selaku bidan desa di Kampung Sialang Baru:

“Sebenarnya sudah banyak edukasi-edukasi yang kita sampaikan kepada orangtua terkait pencegahan stunting ini. Akan tetapi banyak dari mereka yang kurang telaten dan masih ada masyarakat yang tidak terima dan takut jika di bilang anaknya bermasalah gizi terutama stunting, masih adanya masyarakat tidak mau membawa anaknya ke posyandu setiap bulan sehingga data penimbangan dan pengukuran rendah, ada juga masyarakat tidak terlalu peduli jika anaknya terkena masalah gizi dan malah cenderung marah jika di datangi petugas”

Ketidak tahuan orangtua tentang stunting ini merupakan faktor penghambat dalam mewujudkan zero stunting, karena masyarakat beranggapan bahwa balita mereka yang terkena stunting ini merupakan faktor keturunan dan merasa bahwa ini bukanlah keadaan yang serius untuk segera mungkin diselesaikan. Masyarakat beranggapan bahwa anak mereka tidaklah mengalami sakit atau kondisi serius dilihat dari anaknya yang masih lincah dalam beraktifitas dan seperti anak pada umumnya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Pemerintah Kampung Sialang Baru Dalam Memberdayakan Masyarakat Untuk Mewujudkan Zero Stunting kabupaten Siak sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman bagi masyarakat tentang mewujudkan bahaya stunting dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam upaya meningkatkan pemahaman pemahaman untuk mencegah stunting dilakukan melalui kebijakan yang dilakukan pemerintah kampung Sialang Baru.

Dalam pelaksanaan kegiatan mewujudkan Zero Stunting ini pemerintah bekerja sama dengan pihak tenaga kesehatan untuk menjelaskan kepada keluarga penderita stunting untuk tentang pencegahan stunting serta kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan baik fisik, mental, dan sosial. Yang pada awalnya mereka tidak mengetahui jika stunting sangat berbahaya bagi penderita untuknya saat ini dan masa depannya. Maka peran pemerintah dalam mewujudkan Zero Stunting Kampung Sialang Baru untuk mewujudkan Zero Stunting, yaitu menyadarkan Masyarakat untuk peduli dan tidak membiarkan begitu saja akan bahaya stunting. Tujuan penelitian ini memberikan pemahaman ataupun edukasi bagi Masyarakat untuk mencegah stunting (gagal pertumbuhan) pada balita, karena stunting ini juga berbahaya bagi pada penderita stunting.

Meskipun ditemukannya kendala dalam mewujudkan Zero Stunting ini yaitu kondisi ekonomi masyarakat kampung sialang baru yang tidak memadai, sehingga asupan dan gizi ibu saat hamil tidak terpenuhi, dan juga faktor pendidikan orang tua

yang rendah. Akan tetapi Pemerintah Kampung Sialang Baru telah berperan aktif untuk mewujudkan zero stunting dan dianggap berhasil secara berangsur-angsur sudah menurun, hal ini Karena pemerintah Kampung Sialang Baru telah dapat membantu mereka dalam memecahkan masalah yang telah mereka hadapi yaitu Stunting. Dan hal tersebut dapat diselesaikan dengan sudah mulai produktifnya pemeriksaan ibu hamil dengan mengkonsumsi pil tambah darah, perubahan makanan bergizi untuk ibu hamil dan anak-anak balita, sanitasi yang sudah baik, lingkungan yang baiki, dan air yang layak konsumsi.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang peneliti berikan sebagai berikut:

1. Pemerintah kampung sialang baru mengoptimalkan fungsi puskesmas melalui pemberian penyuluhan secara rutin disertai dengan pemberian pengetahuan mengenai pengetahuan gizi dan pola asuh anak yang baik kepada orang tua, terutama ibu agar pemahaman mereka mengenai pentingnya asupan gizi pada balita lebih meningkat.
2. Menurut penulis agar dapat mewujudkan zero stunting yaitu dapat memenuhi kebutuhan gizinya, jika terkendala di biaya, boleh menggunakan alternative lain seperti pemanfaatan lahan halaman rumahnya untuk menanam sayuran dan pembuatan kolam ikan, sehingga kebutuhan gizinya bisa terpenuhi tanpa mengeluarkan uang yang cukup besar.
3. Pemerintah juga harus lebih giat lagi dan meluangkan waktunya lebih banyakan untuk mengamati terus perkembangan mewujudkan Zero Stunting,

dan menunjuk beberapa pendamping supaya lebih efektif dalam mewujudkan Zero Stunting.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, D., & Megawati, S. (2022). EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN MOJOKERTO. *Publika*.
- Anggara Setya Saputra, Suryoto, S., & Chamid Sutikno. (2022). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Purbalingga. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*.
- Anwar, S., Winarti, E., & Sunardi, S. (2022a). SYSTEMATIC REVIEW FAKTOR RISIKO, PENYEBAB DAN DAMPAK STUNTING PADA ANAK. *Jurnal Ilmu Kesehatan*.
- Anwar, S., Winarti, E., & Sunardi, S. (2022b). SYSTEMATIC REVIEW FAKTOR RISIKO, PENYEBAB DAN DAMPAK STUNTING PADA ANAK. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 11(1), 88.
- Anyualatha Haridison. (2021). MODAL SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*. <https://doi.org/10.37304/jispar.v2i2.363>
- Aurima, J., Susaldi, S., Agustina, N., Masturoh, A., Rahmawati, R., & Tresiana Monika Madhe, M. (2021). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Stunting pada Balita di Indonesia. *Open Access Jakarta Journal of Health Sciences*.
- Azfirmawarman, D., Magriasti, L., & Yulhendri, Y. (2023). Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*.
- Cahyono, A. S. (2016). Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial & Ilmu Politik Diterbitkan Oleh Fakultas Ilmu Sosial & Politik, Universitas Tulungagung*.

- Cristianingsih, E. (2018). Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*.
- Della Ertiana, E. (2022). Dampak Pencemaran Udara Terhadap Kesehatan Masyarakat: Literatur Review. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*.
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*.
- Edi Suharto. (2006). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. In *PT Refika Aditama*.
- Goa, L. (2017). PERUBAHAN SOSIAL DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT. *SAPA - Jurnal Kateketik Dan Pastoral*.
- Harahap, M., Firman, F., & Ahmad, R. (2021). Penggunaan Social Media dan Perubahan Sosial Budaya Masyarakat. *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN*. <https://doi.o>
- Hasyim, D. I., Saputri, N., & Yulianto, A. (2022). GERAKAN PENCEGAHAN STUNTING MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBERIAN ASI EKSLUSIF DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS GADING REJO. *JURNAL BAGIMU NEGERI*.
- Hendra, T. (2017). PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJAMIN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN UNTUK PENGEMBANGAN INVESTASI. *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Hidayat, I., Ayu, P., & Puspaningrum, I. I. (2023). PENGEMBANGAN MASYARAKAT MELALUI POTENSI LOKAL DALAM MEWUJUDKAN DESA MANDIRI. *PUBLIC CORNER*.
- Joko Subagyo. (2015). Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek. *Jakarta: Rineka Cipta*.
- Letor, R. P. (2021). POLICY ENTREPRENEURS DAN JARINGAN KEBIJAKAN

PENGENTASAN KEMISKINAN DI ERA DESENTRALISASI. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*.

Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2017). Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik Alfabeta. In *Cv. Bandung*.

Milakarma, P., & Montessori, M. (2018). Pemerintah Nagari dan Upaya Memberdayakan Masyarakat. *Journal of Civic Education*.

Naufal, M., Hansen, & Ghozali. (2023). Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*.

Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*.

Nugroho, B. E., & Pradana, G. W. (2021). PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI PROGAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KOTA SURABAYA. *Publika*.

Nurdin, A. F. (2009). Integralisme Islam dan Nilai-nilai Filosofis Budaya Lokal pada Pembangunan Propinsi Lampung. *Unisia*. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol32.iss71.art6>

Poerwandari, K. (2011). Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, Bandung, Alfabeta,2011. *Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D, Bandung, Alfabeta,2011*.

Pratama, D. P., Hadi, S., & Syaifuddin, M. (2023). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*.

Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*.

Roslina, R. (2023). PENGUATAN MODAL SOSIAL UNTUK PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT MISKIN PEDESAAN. *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*.

Rulyansah, A., & Hayukasari, D. N. (2018). Pengembangan Model Pembelajaran Role Playing berwawasan Kecerdasan Interpersonal pada Siswa Kelas II Semester Ganjil di SDN Ambulu I Sumberasih - Probolinggo Tahun Pelajaran 2017/2018. *Pedagogy: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*.

Rushananto. (2014). Kebijakan Publik. *Kebijakan Publik*.

Sawali, A., Kaharuddin, K., Ismail, L., & Abdul, N. B. (2023). Pendidikan dan Perubahan Sosial (Studi Masyarakat Nelayan Pulau Karampuang Kabupaten Mamuju). *Journal Socius Education*.

Sevina Yushinta Anjani, & Binti Maunah. (2022). Perubahan Sosial Serta Upaya Menjaga Kestinambungan Masyarakat. *JURNAL PENDIDIKAN IPS*.

Sudirman, R., Thahir, T., & Suryadi, S. (2022). Jaringan Kebijakan Publik dalam Implementasi Program Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif Sikamaseang di Kabupaten Gowa. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*.

Valeriani, D., Prihardini Wibawa, D., Safitri, R., & Apriyadi, R. (2022). Menuju Zero Stunting Tahun 2023 Gerakan Pencegahan Dini Stunting Melalui Edukasi pada Remaja di Kabupaten Bangka. *Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdikan Terhadap Masyarakat)*.

Wahanani Mawasti, & Umh Rizky, F. (2020). PERANAN ASET KOMUNITAS DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM PADA BANK SAMPAH SONGOLIKOER. *INTELEKSIA - Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah*.

Wahyu Setiawan, A., & Ariani, M. . N. (2022). Determinasi Faktor Yang Mempengaruhi Indeks

Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 – 2019. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*.

## LAMPIRAN

1. Wawancara Dengan Ibu Yuni selaku Bidan di kampung Sialang Baru Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak



2. Wawancara Dengan Ibu Solipah selaku Kader Posyandu di kampung Sialang Baru Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak



**3. Wawancara Dengan Ibu Siti Moniaroh selaku ibu balitadi kampong Sialang Baru  
Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak**



## Riwayat hidup



Penulis Bernama Junaidi Rais, lahir di Muara Lembu, 11 Juni 1978 beragama Islam. Penulis merupakan pura dari pasangan Bapak (Alm). Ramli dan Ibu Darmi. Penulis bersekolah di SD Negeri 01 Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuansing tamat tahu 1990 dan melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 01 Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuansing tamat tahun 1993. Penulis juga melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 01 Muara Lembu Kecamatan Singingi Kabupaten Kuansing tamat tahun 1996. Setelah lulus jenjang Sekolah Menengah Atas peneliti masuk CASIS POLRI dan lulus tahun 1998 dan penempatan pertama di Polda Riau. Pada tahun 1999 penulis pindah dan bertugas di Aceh ops Rencong II sampai tahun 2000. Selanjutnyapada tahun 2003 peneliti bertugas di Polres Siak sanmapai tahun 2005, dan pada tahun tersebut peneliti dipindahkan tugas di Polsek Lubuk Dalam dan bertugas sampai sekarang dan menempati jabatan sebagai Bhabinkantibmas Kampung Sialang Baru. Pada tahun 2007 peneliti menikah dengan Wan Neti Ramdan dan dikaruniai 2 Anak yaitu Habib Aqil Syafiq dan Haykal Hafuza. Pada tahu 2020 peneliti melanjutkan Pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di kampus Institut Agama Islam (IAI) Diniyyah Pekanbaru. Peneliti KUKERTA di Kantor Desa Lubuk Dalam dan PPL di Polsek Lubuk Dalam.

## DAFTAR WAWANCARA

Dalam pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “**PERAN PEMERINTAH KAMPUNG SIALANG BARU UNTUK MEWUJUDKAN ZERO STUNTING KABUPATEN SIAK**”. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah:

Daftar Pertanyaan:

1. Menurut saudara bagaimana peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat untuk mewujudkan Zero Stunting di Kampung Sialang Baru Kabupaten Siak?
2. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan mewujudkan Zero Stunting Di Kampung Sialang Baru Kabupaten Siak?
3. Apa tujuan Mewujudkan Zero Stunting Di Kampung Sialang Baru Kabupaten Siak?
4. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Pemerintah dalam Memberdayakan Masyarakat untuk Mewujudkan Zero Stunting Di Kampung Sialang Baru Kabupaten Siak?
5. Bagaimana Partisipasi Masyarakat terutama yang mempunyai balita stunting akan kegiatan Mewujudkan Zero Stunting Di Kampung Sialang Baru Kabupaten Siak?
6. Apa saja kendala yang dialami untuk Mewujudkan Zero Stunting Di Kampung Sialang Baru Kabupaten Siak?
7. Apa saja yang dilakukan dalam pencegahan Stunting Di Kampung Sialang Baru Kabupaten Siak?
8. Apa harapan saudara terkait Mewujudkan Zero Stunting Di Kampung Sialang Baru Kabupaten Siak?

